LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP

TAHUN ANGGARAN 2025

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN NGANJUK

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah Nya, sehingga dapat tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2025. Laporan Kinerja disusun sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja sebagai alat kendali dalam penilaian capaian kinerja berdasarkan Tugas Pokok Fungsi yang ada pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk. Selain itu, laporan kinerja merupakan bagian untuk evaluasi kinerja pada setiap individu maupun bidang. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini menggambarkan pencapaian kerja selama Tahun 2025 yang masih banyak kekurangan. Untuk itu, dapat diberikan masukan berupa saran dan kritik yang bermanfaat guna peningkatan kinerja yang lebih baik, sehingga hasil kerja untuk tahun-tahun selanjutnya dapat meningkat dan terwujud sepenuhnya dengan baik.

Untuk itu sejak Tahun 2017 ditetapkan kebijakan dalam Bidang Sosial yakni, Penyelenggaraan perlindungan sosial dan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Pembentukan tim koordinasi dalam penanganan masalah sosial yang cepat tanggap, Peningkatan pemberdayaan lembaga masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, dan Pendataan angka kemiskinan agar diperoleh data yang akurat. Sedangkan Kebijakan Bidang PPPA yakni, Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarustamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG, Peningkatan pemberdayaan peran perempuan dalam pembangunan serta pemenuhan hak Anak, Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan fokus pada UMKM Perempuan, Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang

Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot, Peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan implementasi kebijakan terkait pemenuhan hak anak, dan Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak

Dalam pelaksanaan kebijakan Penyelenggaraan perlindungan sosial dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, Pembentukan tim koordinasi dalam penanganan masalah sosial yang cepat tanggap, Peningkatan pemberdayaan lembaga masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, dan Pendataan angka kemiskinan agar diperoleh data yang akurat ditetapkan Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana, dan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Untuk terwujudnya Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarustamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG, Peningkatan pemberdayaan peran perempuan dalam pembangunan serta pemenuhan hak Anak, Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan fokus pada UMKM Perempuan, Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot, Peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan implementasi kebijakan terkait pemenuhan hak anak, dan Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak melalui Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), dan Program Perlindungan Khusus Anak.

LKjIP ini merupakan gambaran tingkat pencapaian Sasaran dan Tujuan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai penjabaran visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Sub kegiatan – Sub kegiatan sesuai dengan kegiatan serta program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Tahun 2025 terdapat sasaran yang tertuang di dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 Dinas Sosial Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk yakni, Meningkatnya Ketercukupan Kebutuhan Dasar PPKS, Meningkatnya Kesetaraan Gender, Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Hak Anak.

Sedangkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk yakni, Meningkatnya Fungsi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Meningkatnya Peran PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Meningkatnya Pemberdayaan Gender (IDG), dan Meningkatnya Kapasitas dan Kolaborasi antar Lembaga Perlindungan Anak.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 diharapkan dapat memacu peningkatan kinerja dan peluang-peluang menuju perbaikan yang terus dilakukan.

Kepala Dinas Sosial PPPA
Kabupaten Nganjuk

HARIS JATMIKO, S.Pd.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19711219 199803 1 006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
KATA PENGANTAR..... ii
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL..... vi
DAFTAR BAGAN viii
DAFTAR DIAGRAM ix
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang..... 1
1.2 Landasan Hukum..... 1
1.3 Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi 3
1.4 Isu- isu Strategis 11
1.5 Sistematika Penulisan..... 12
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1 Ikhtisar/ Ringkasan Renstra/ Renja 13
2.2 Perjanjian Kinerja..... 32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja 36
3.2 Realisasi Anggaran..... 95
IV PENUTUP
4.1 Kesimpulan 101
Lampiran..... 103

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Strategi dan Kebijakan Renstra Tahun 2024-2026 Dinas Sosial PPPA Tahun 2025 16
Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2024-2026 Dinas Sosial PPPA Tahun 2025 20
Tabel 2.3 Capaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2024-2026 Dinas Sosial PPPA Tahun 2025 21
Tabel 2.4 Strategi dan Kebijakan Renstra Tahun 2025-2029 Dinas Sosial PPPA Tahun 2025 28
Tabel 2.5 Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 Dinas Sosial PPPA Tahun 2025 31
Tabel 2.6 Capaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 Dinas Sosial PPPA Tahun 2025 31
Tabel 2.7 Sasaran Dinas Sosial PPPA Tahun 2025..... 34
Tabel 3.1.1 Realisasi Kinerja Tahun 2025 36
Tabel 3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan 2024, 2023, dan 2022 41
Tabel 3.1.3.1 Target Kinerja Renstra 47
Tabel 3.1.3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra..... 48
Tabel 3.1.4.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standart Nasional (Renstra Tahun 2024-2026)..... 52
Tabel 3.1.4.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standart Nasional (Renstra Tahun 2025-2029)..... 53
Tabel 3.1.5 Keberhasilan/ Kegagalan Capaian Kinerja 55
Tabel 3.1.6 Efesiensi Penggunaan Sumber Daya 62
Tabel 3.1.7 Analisis program/ Kegiatan Penunjang Keberhasilan/ Kegagalan..... 65
Tabel 3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2025..... 96

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Fungsi..... 8
Bagan 2. Kerangka Logis Kinerja Dinas Sosial PPPA 22
Bagan 3. Crosscutting Kinerja Dinas Sosial PPPA 22
Bagan 4. Cascading Kinerja Dinas Sosial PPPA 24

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. Kelompok Jabatan 9
Diagram 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan 10

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP).

Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban dan pertanggung jawaban keberhasilan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dituntut selalu melakukan perbaikan kinerja sesuai dengan target yang telah di tentukan pada awal perencanaan.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Nganjuk, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan juga sinergitas dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Untuk terwujudnya tata pemerintahan yang baik diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 15)
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

16. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029

1.3 Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi

1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk dan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Berikut tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk

1. Tugas Pokok

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2. Fungsi

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
b. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
d. Pelaksanaan Administrasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
e. Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Bupati Sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

1.3.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas menetapkan kebijakan teknis, menyelenggarakan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan serta menyelenggarakan tugas di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Program dan Anggaran;
b. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan;
c. Pengelolaan Perlengkapan, Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Barang Milik Negara dan Barang Milik Daerah;
d. Pembinaan Aparatur;
e. Pengelolaan Urusan Kepegawaian;
f. Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Anggaran;
g. Pelaksanaan Fasilitasi Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Milik Daerah;
h. Pembinaan dan Koordinasi Urusan Kepegawaian;
i. Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional; dan
j. Pelaksanaan Fungsi Lain dang Diberikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang Berkaitan dengan Tugasnya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a. Melaksanakan Urusan Persuratan;
b. Melaksanakan Pengelolaan Dokumentasi dan Kearsipan;
c. Melaksanakan Urusan Kerumahtanggaan, Keamanan dan Ketertiban Kantor;
d. Melaksanakan Pengelolaan Perlengkapan, Barang Milik Negara dan Barang Milik Daerah;

e. Melaksanakan Urusan Kepegawaian, Pembinaan Aparatur dan Administrasi Jabatan Fungsional;
f. Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan; dan
g. Melaksanakan Tugas Lain yang Diberikan oleh Sekretaris Sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

3. Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan, Rehabilitasi Sosial dan Kebencanaan

Bidang Perlindungan, Jaminan, Rehabilitasi Sosial dan Kebencanaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan rehabilitasi sosial serta jaminan sosial.

Bidang Perlindungan, Jaminan, Rehabilitasi Sosial dan Kebencanaan menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial keluarga;
d. Pengembangan data pelayanan sosial orang dengan hiv/aids (odha) dan penyalahgunaan napza untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkaitan dengan tugasnya.

4. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan mempunyai tugas merumuskan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial dan kepahlawanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan sosial dan kepahlawanan;
b. Perumusan pedoman penyelenggaraan pemberdayaan sosial dan kepahlawanan;
c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan pemberdayaan sosial dan kepahlawanan;

d. Pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan pemberdayaan sosial dan kepahlawanan;
e. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemberdayaan sosial dan kepahlawanan; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkaitan dengan tugasnya.

5. Bidang Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, merencanakan, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan yang meliputi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, peningkatan kualitas keluarga, pengelolaan sistem informasi data gender dan anak.

Bidang Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengelolaan Sistem Informasi Data Gender dan Anak;
b. Perumusan pedoman teknis program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengelolaan Sistem Informasi Data Gender dan Anak;
c. Pengembangan materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengelolaan Sistem Informasi Data Gender dan Anak;
d. Pelaksanaan koordinasi, singkronisasi, fasilitasi kegiatan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengelolaan Sistem Informasi Data Gender dan Anak;
e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengelolaan Sistem Informasi Data Gender dan Anak; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkaitan dengan tugasnya.

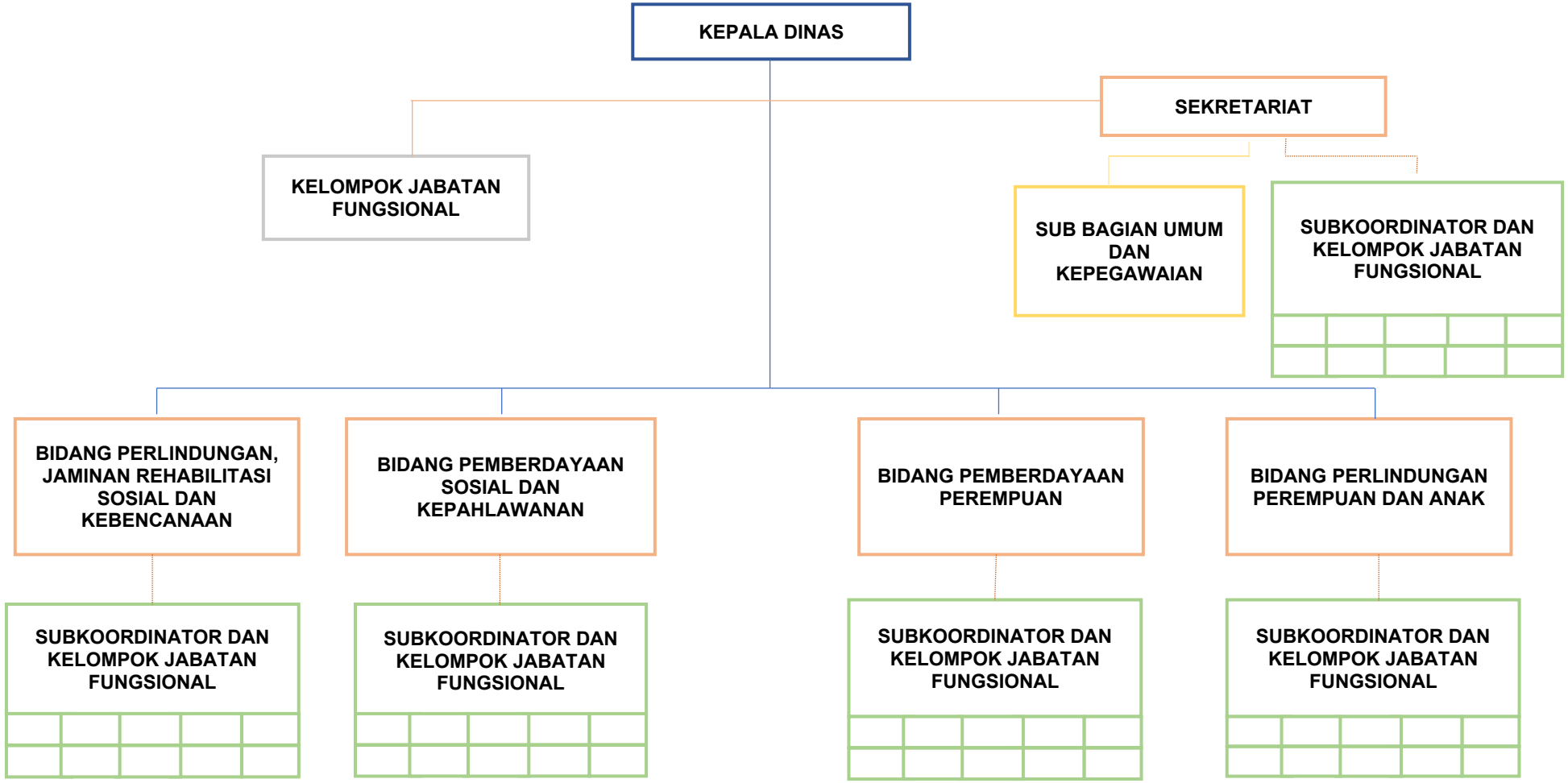
6. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak dan pengarusutamaan hak anak.

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak dan pengarusutamaan hak anak;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak dan pengarusutamaan hak anak;
c. Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak dan pengarusutamaan hak anak;
d. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan jejaring serta partisipasi masyarakat dalam mendukung pengembangan percepatan Kabupaten Layak Anak (KLA) Dan Pengarusutamaan Hak Anak (PHA) sesuai amanat konvensi hak anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkaitan dengan tugasnya.

BAGAN 1.
SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NGANJUK



1.3.3 Kelompok Jabatan

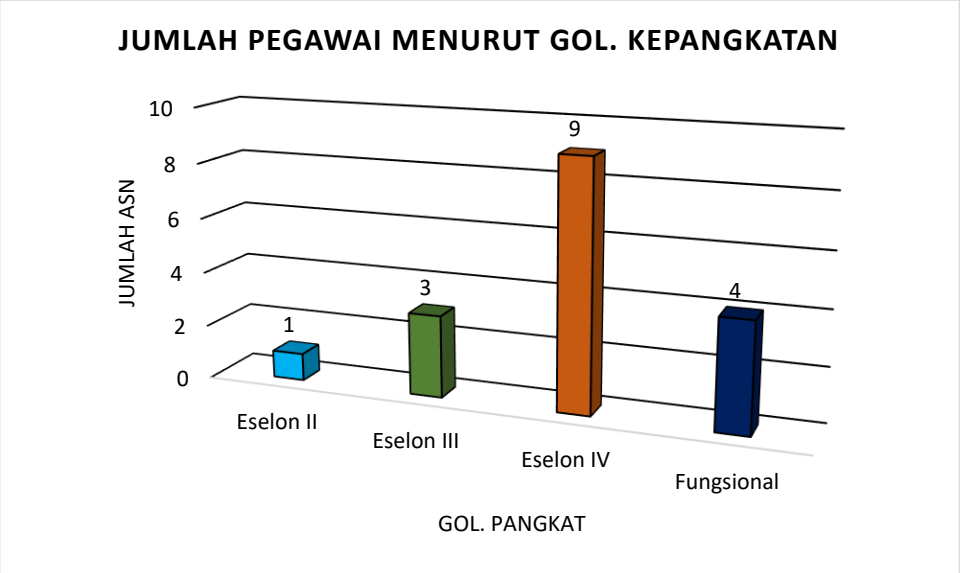
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk di tahun 2025, yakni:

a. Eselon II = 1 orang
b. Eselon III = 3 orang
c. Eselon IV = 9 orang
d. Fungsional = 4 orang

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didukung oleh aparatur sebanyak 19 orang dengan perincian menurut golongan sebagai berikut:

Diagram 1.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan

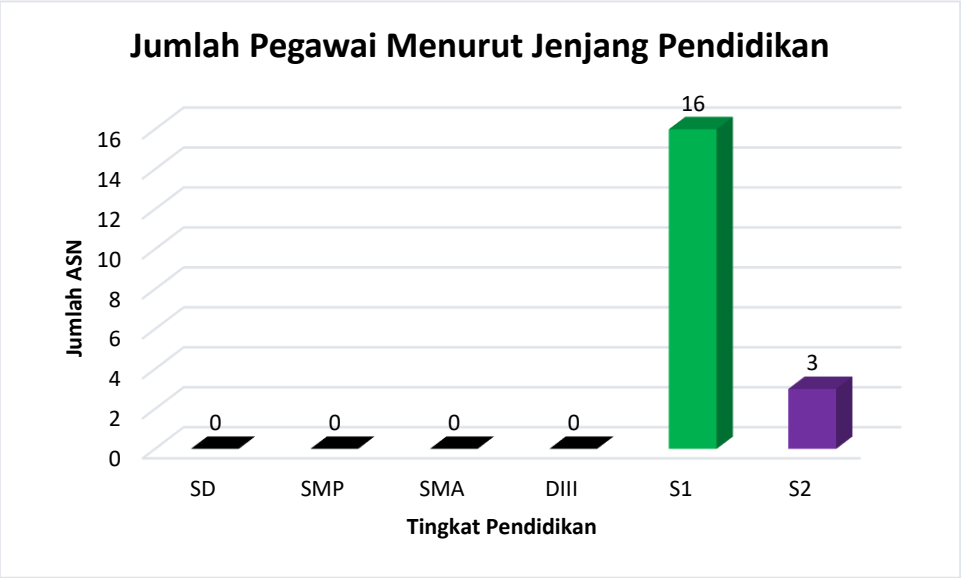


Sumber : Subbag. Umum Dinsos PPPA Kabupaten Nganjuk

Kondisi pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk menurut Tingkat Pendidikannya dapat dilihat sebagai berikut:

Diagram 2.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Sumber : Subbag. Umum Dinsos PPPPA Kabupaten Nganjuk

1.3.4 Aspek Strategis

Dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk dalam penyelenggaraan pelayanan dapat ditinjau dari beberapa aspek strategis, antara lain:

1. Kelembagaan

Pembentukan kelembagaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

2. Hasil Kerja

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan kegiatan antara lain :

a. Melaksanakan Penanganan dan Rehabilitasi bagi 26 PPKS;
b. Memberikan Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi 26 PPKS;
c. Memberikan Bantuan Sosial kepada Lansia Miskin, Penyandang Disabilitas, Siswa Miskin, Petani Tembakau, dan Buruh Pabrik Rokok;
d. Melaksanakan Bimtek bagi Operator SIKS-NG yang berkaitan dengan Verval Data;

e. Memberikan Bantuan Bahan Makan bagi PPKS serta Korban Bencana Alam dan Sosial;
f. Melaksanakan Pelayanan bagi Masyarakat dalam Pengaktifan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Pengecekan DTKS
g. Melaksanakan Sosialisasi bagi Lembaga dan Instansi terkait Pemberian Rekomendasi Perizinan Pengumpulan Uang Berhadiah;
h. Melaksanakan Sosialisasi Peningkatan Kemampuan Tenaga Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) khusus bagi TKSK, PSM dan Karang Taruna;
i. Melaksanakan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP);
j. Meberikan bantuan Hibah bagi PMI dan WCC
k. Melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang kesetaraan dan keadilan gender
l. Melaksanakan sosialisasi kepada organisasi perempuan dan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga
m. Melaksanakan sosialisasi dan roadshow kepada masyarakat maupun lembaga pendidikan mengenai perlindungan perempuan dan anak.
n. Memberikan pendampingan, perlindungan dan dukungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan

1.4 Isu - Isu Strategis Dinas Sosial PPPA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka perlu adanya penentuan isu strategis terkiat permasalahan yang ada pada Perangkat Daerah untuk pemberian pelayanan tepat sasaran yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk. Isu Strategis Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 yang harus ditangani terbagi dalam urusan, yaitu :

1. Isu Strategis Bidang Sosial

a. Terbentuknya Data Base PPKS/PMKS;
b. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Layanan bagi PPKS/ PMKS;
c. Adanya Bimtek dan Evaluasi bagi PSKS;
d. Adanya Kegiatan Pemberdayaan serta Monev Keberlanjutan bagi PPKS/PMKS;
e. Penerbitan Pengumpulan Uang Barang (PUB) dan Undian Gratis Berhadiah (UGB) dengan dikeluarkannya Surat Rekomendasi.

2. Isu Strategis Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Penguatan Sosialisasi dan Edukasi tentang Kesetaraan Gender kepada Masyarakat;
b. Peningkatan kapasitas dan peran Perangkat Daerah dalam implementasi gender;
c. Peningkatan Layanan Kekerasan Perempuan dan Anak serta Korban TPPO;
d. Optimalisasi Pemenuhan Hak Anak.

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan pencapaian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk selama tahun 2025. Capaian Kinerja Tahun 2025 diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja Perangkat Daerah. Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi
1.4 Isu-Isu Strategis Dinas Sosial PPPA
1.5 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

1.1 Ikhtisar/ Ringkasan Renstra/ Renja
1.2 Perjanjian Kinerja pada Tahun yang Bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Dinas Sosial PPPA
3.2 Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 memaparkan tujuan dan sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi sasaran indikator Kinerja Utama serta mengevaluasi dari sasaran dan beberapa kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi. Penyusunan Laporan Kinerja disusun berdasarkan :

1. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026
2. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029
3. Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2025
4. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2025
5. Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

2.1 Ikhtisar/ Ringkasan Renstra/ Renja

2.1.1 Ikhtisar Perencanaan Kinerja Berbasis RPD 2024–2026

Rencana Strategis merupakan langkah awal yang dilakukan instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, sehingga dengan pendekatan perencanaan yang jelas dan terarah dapat selaras dengan visi misi yang dilaksanakan. Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk memuat tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 3 Tahun.

Pada hakekatnya Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 merupakan dokumen rencana strategis yang berisi komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja dalam mewujudkan efektifitas, efisiensi, produktivitas serta derajat profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Perempuan dan Anak.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diselaraskan dengan kebijakan dan program pembangunan daerah, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk melakukan Rencana Strategis Tahun 2024-2026 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam pencapaian tujuan organisasi pada Tahun 2024-2026.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026. Sebagaimana yang dituangkan pada RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 bahwa Visi Kabupaten Nganjuk sebagai berikut:

"Nganjuk yang Maju, Adil, dan Sejahtera"

Visi pembangunan daerah tahun 2005-2025 tersebut mengarah pada pencapaian tujuan nasional. Visi pembangunan daerah tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemajuan, keadilan dan kesejahteraan yang ingin dicapai. Dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Nganjuk Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengampu misi ke-3, yaitu :

> *"Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan, adalah menyelenggarakan pembangunan daerah yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyararakat, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok, kecamatan, desa dan kelurahan yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara efektif; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan termasuk gender. Di samping itu pemenuhan hak-hak dasar masyarakat semakin ditingkatkan, seperti layanan kesehatan, akses*

pendidikan, pembangunan perumahan, memperkuat sistem jaminan sosial, peningkatan upah tenaga kerja"

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 terdapat arah kebijakan umum Tahun 2024, yaitu :

"Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM"

Berdasarkan arah kebijakan umum, maka Urusan Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk mengampu Tujuan ke-1, yaitu:

"Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemerataan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Hidup"

Sasaran Urusan Sosial yang diampu oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk adalah sasaran ke-4, yaitu:

"Mengurangi Penduduk Miskin Melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Desa"

Sedangkan Urusan PPPA Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk mengampu Tujuan ke-2, yaitu:

"Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing"

Sasaran Urusan PPPA yang diampu oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk adalah sasaran ke-3, yaitu:

"Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender"

Sebagaimana sasaran yang dituangkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 bahwa meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Nganjuk diukur melalui sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk yaitu dengan mengurangi jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan meningkatkan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan, berkeadilan dan merata kepada masyarakat serta optimalisasi program pemberdayaan masyarakat.

Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi dijabarkan melalui kebijakan dan program yang dilaksanakan. Strategi merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan serta sasaran

dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Penjabaran pertama dari strategi adalah berupa kebijakan, ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi organisasi. Penjabaran selanjutnya adalah berupa program yaitu kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk dapat mewujudkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran tertentu sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Atas dasar arti dan makna strategi tersebut maka dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk 1 (satu) Tahun kedepan (2024-2026), ditetapkan strategi berupa kebijakan dan program sebagai berikut :

Tabel 2.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi	Kebijakan
Mengurangi jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan meningkatkan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan, berkeadilan dan merata kepada masyarakat serta optimalisasi program pemberdayaan masyarakat	Penyelenggaraan perlindungan sosial dan penanganan penyandang masalah kesejahtera an sosial.
Mereview, menyusun dan mengkoordinasikan permasalahan yang membuat penanganan PMKS masih sulit dijangkau	Pembentukan tim koordinasi dalam penanganan masalah sosial yang cepat tanggap
Meningkatkan peran serta masyarakat dan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Peningkatan pemberdayaan lembaga masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Meningkatkan kapasitas PSKS	Pendataan angka kemiskinan agar diperoleh data yang akurat
Meningkatkan kualitas SDM unsur sosial agar lebih cepat tanggap dalam menangani permasalahan sosial	
Menyusun,mereview,mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah.	Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarustamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG.
Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang.	Peningkatan pemberdayaan peran perempuan dalam pembangunan serta pemenuhan hak Anak

Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG	Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan fokus pada UMKM perempuan.
Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat daerah.	Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang
Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot.
Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif.	Peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan implementasi kebijakan terkait pemenuhan hak anak
Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif.	Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak.
Meningkatnya kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan sehingga bisa menjadi tenaga profesional dan memberikan kontribusi pendapatan dalam perekonomian	
Meningkatnya kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat	
Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak perempuan dan anak	
Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak.	
Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di tingkat Kecamatan untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak	
Meningkatkan peran serta, keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan serta pemenuhan hak Anak.	

Keberhasilan pelaksanaan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk pada Tahun Anggaran 2025 melaksanakan 2 Urusan dengan didukung alokasi anggaran Rp23.733.163.929.00 antara lain :

Urusan Sosial

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Pemberdayaan Sosial

a. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
b. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

Program Rehabilitasi Sosial

a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penanganan Bencana

a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Program Perlindungan Perempuan

a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota
b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota *(anggaran pada sub kegiatan dinolkan ketika perubahan APBD Tahun 2025)*

Program Peningkatan Kualitas Keluarga

a. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
c. Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
b. Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota *(anggaran pada sub kegiatan dinolkan ketika perubahan APBD Tahun 2025)*

Program Perlindungan Khusus Anak

a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
b. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan

a. Mengurangi Penduduk Miskin
b. Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender, serta Pemberdayaan Perempuan

Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu satu tahun atau kurang, dalam rentang waktu masa Rencana Strategis (Tahunan, Semesteran, Tribulanan, atau Bulanan). Adapun penjabaran tujuan dalam bentuk sasaran-sasaran Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk sebagai berikut:

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial PPPA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1	2	3	4
A	**Meningkatnya Kesejahteraan Sosial PPKS**		**Persentase Penurunan PPKS**
1		Meningkatnya Ketercukupan Kebutuhan Dasar PPKS	Persentase PPKS yang Tercukupi Kebutuhan Dasarnya
B	**Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Perempuan**		**Indeks Pembangunan Gender**
			Skor Kabupaten Layak Anak
1		Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender
2		Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak

Sumber : Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 Dinas Sosial PPPA

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk 3 sasaran untuk mencapai visi misi yang telah ditetapkan. Keempat sasaran tersebut dilaksanakan dalam 2 urusan yaitu, Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Tabel 2.3 Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Perencanaan Renstra 2024-2026	Target Tahun 2025
1	2	3	4	5
A	**Meningkatnya Kesejahteraan Sosial PPKS**	**Persentase Penurunan PPKS**	**Renstra Tahun 2024-2026**	**5,00**
1	Meningkatnya Ketercukupan Kebutuhan Dasar PPKS	Persentase PPKS yang Tercukupi Kebutuhan Dasarnya	Renstra Tahun 2024-2026	87
B	**Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Perempuan**	**Indeks Pembangunan Gender**	**Renstra Tahun 2024-2026**	**94,09**
		Skor Kabupaten Layak Anak	**Renstra Tahun 2024-2026**	**Madya (650)**
1	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	Renstra Tahun 2024-2026	72.6
2	Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak	Renstra Tahun 2024-2026	64

c. Rencana Kerja (Renja)

Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencakup program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 dengan mengacu pada dokumen Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026. Rencana kerja memuat rencana tingkat hasil yang diharapkan pada setiap kegiatan yang dilaksanakan. Berikut disampaikan Kerangka Logis dan Cacading Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025, sebagai berikut:

Bagan 2.

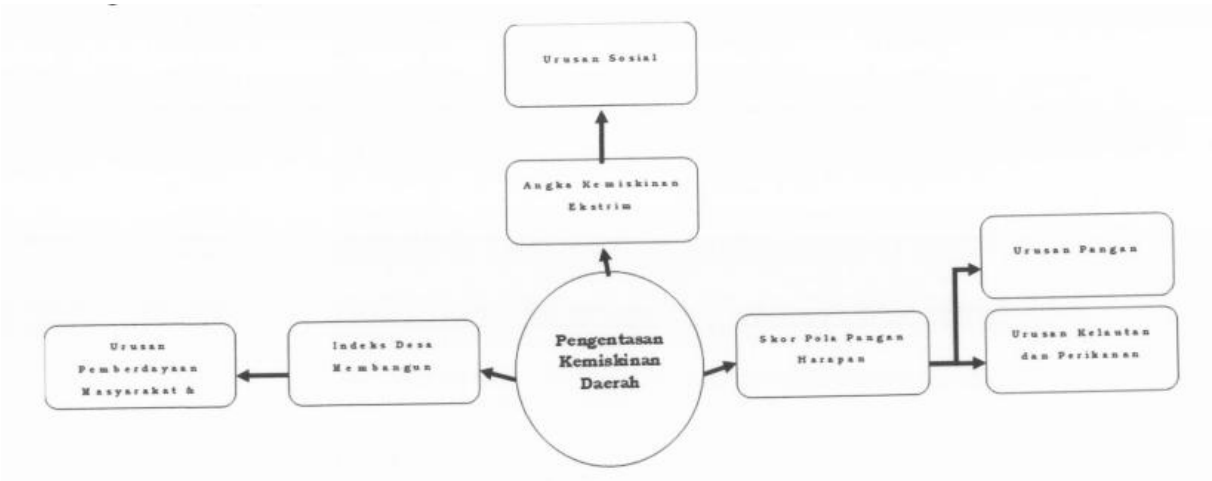
Kerangka Logis Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



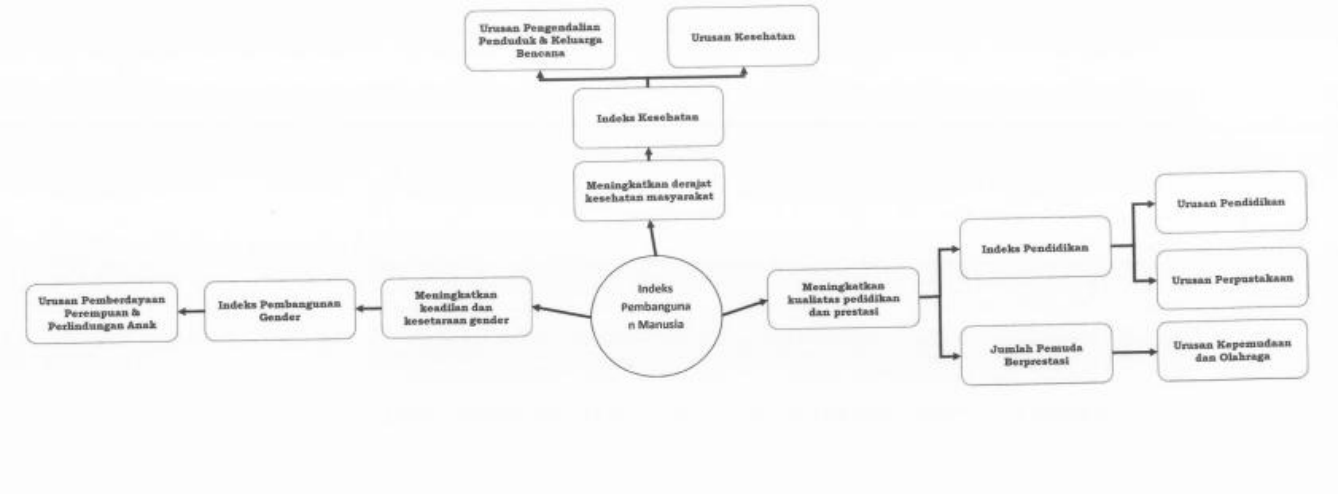
Bagan 3.

Crosscutting Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Urusan Sosial

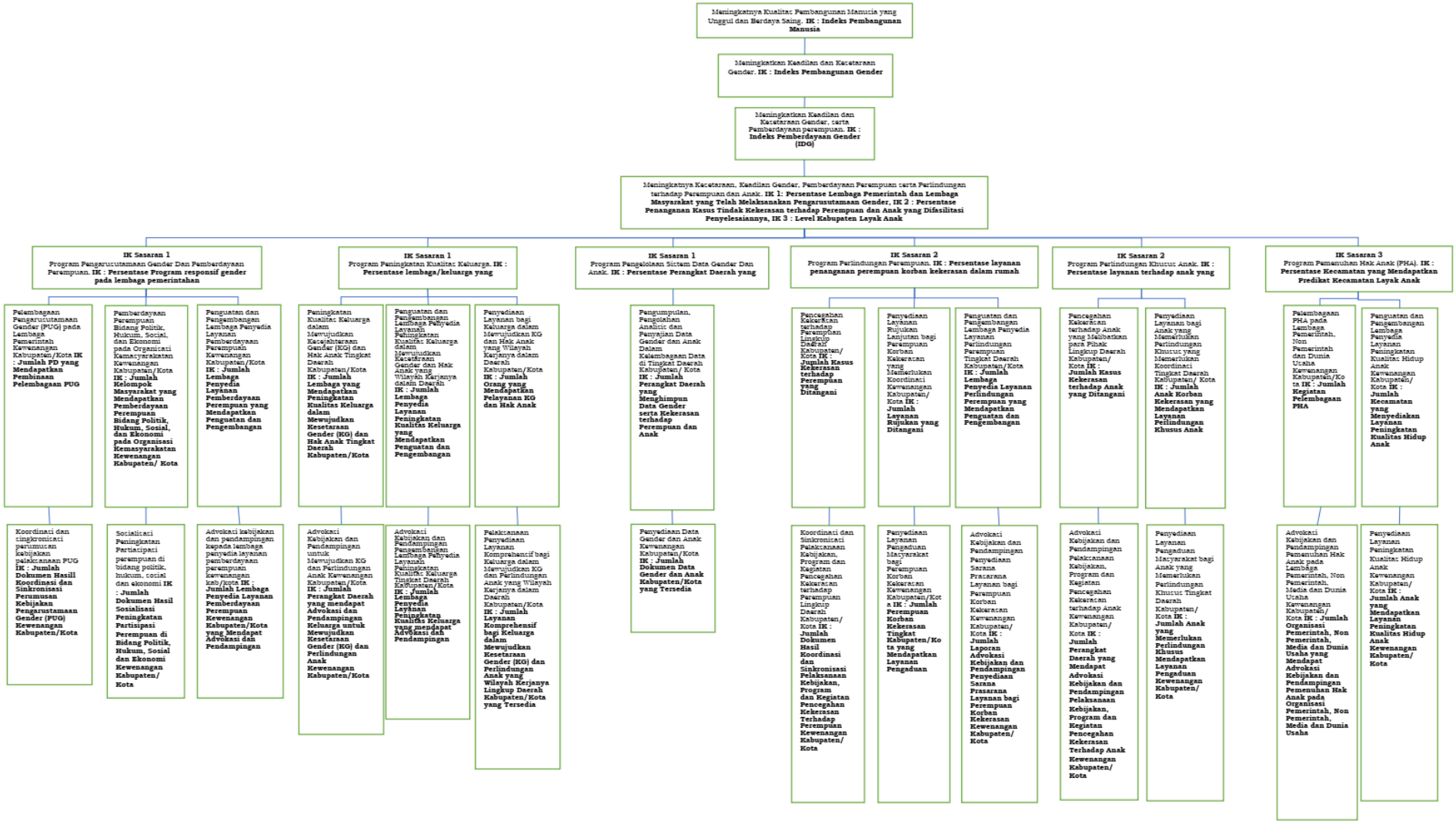


b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

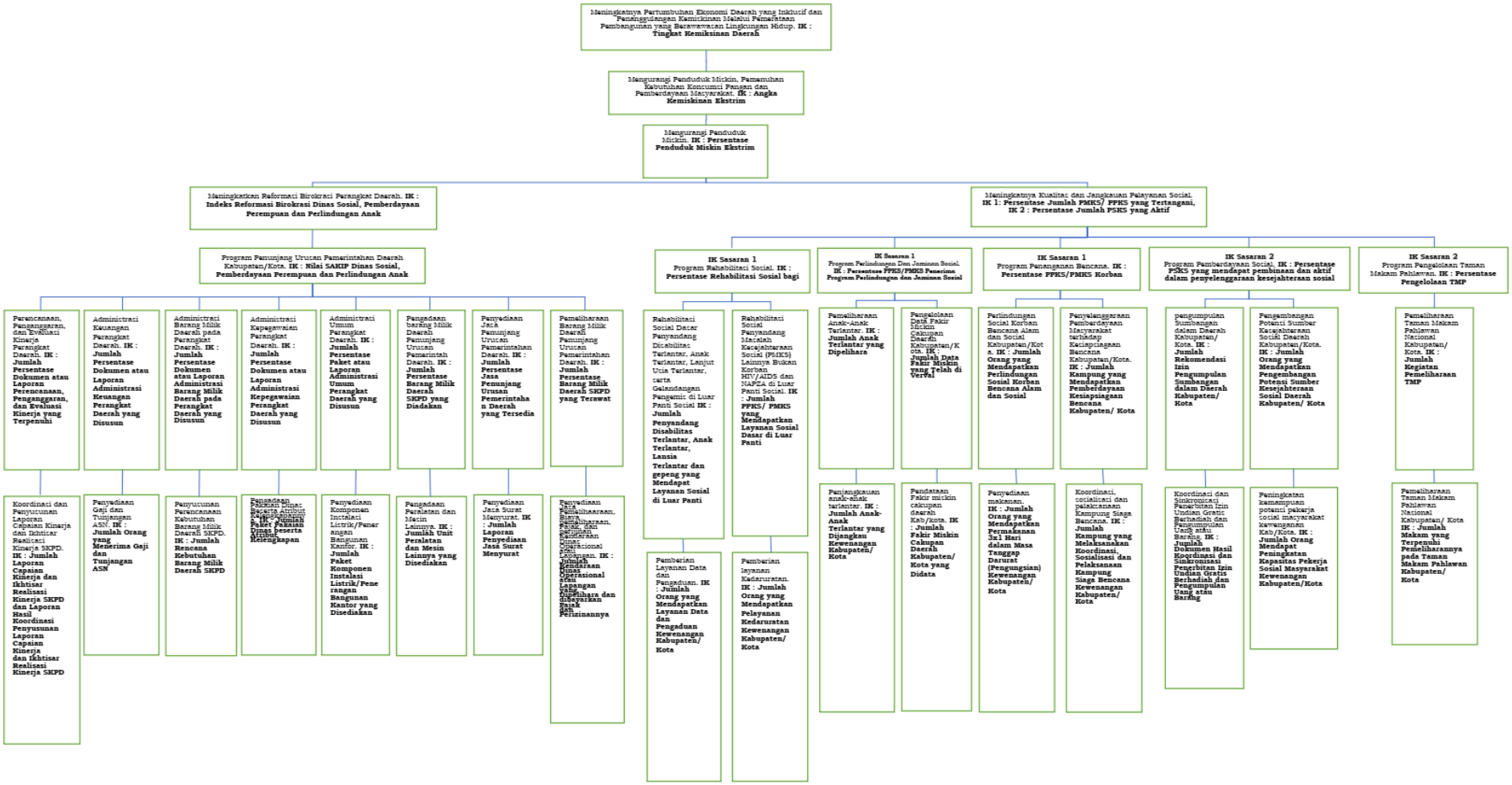


Bagan 4. Cascading Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Urusan Sosial



b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



2.1.2 Ikhtisar Perencanaan Kinerja Berbasis RPJMD Tahun 2025-2029

Rencana Strategis merupakan langkah awal yang dilakukan instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, sehingga dengan pendekatan perencanaan yang jelas dan terarah dapat selaras dengan visi misi yang dilaksanakan. Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk memuat tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 Tahun.

Pada hakekatnya Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 merupakan dokumen rencana strategis yang berisi komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja dalam mewujudkan efektifitas, efisiensi, produktivitas serta derajat profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Perempuan dan Anak.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk adalah Organisasi Perangkat Daerah Teknid yang dibentuk sesuai Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk yang mempunyai tugas di Bidang Urusan Sosial dan PPPA. Sejalan dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Periode Tahun 2025-2030, maka diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Periode Tahun 2025-2029 yang dapat dijabarkan dalam Visi, Misi dan Tujuan sebagai berikut:

Visi

“MEWUJUDKAN KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARTABAT”

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD yang sesuai dengan pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut:

Misi Ke-4

“MENINGKATKAN KUALITAS, PELAYANAN, MUTU PENDIDIKAN DAN KESEHATAN UNTUK MENGHASILKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS”

Sebagai bentuk penjabaran dari visi dan misi RPJMD ditetpakan tujuan dan sasaran RPJMD. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk mendukung dua tujuan RPJMD. Tujuan RPJMD *pertama* yang diampu oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk, yaitu:

"Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas"

Sasaran Urusan PPPA yang diampu oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk, yaitu:

"Meningkatnya Kesetaraan Gender"

Sedangkan Urusan PPPA Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk berdasarkan tujuan RPJMD *kedua*, yaitu:

"Meningkatnya Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan"

Sasaran Urusan Sosial yang diampu oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk, yaitu:

"Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif"

Sebagaimana sasaran yang dituangkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 bahwa meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Nganjuk diukur melalui tujuan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk yaitu Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak.

Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi dijabarkan melalui kebijakan dan program yang dilaksanakan. Strategi merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan serta sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Penjabaran pertama dari strategi adalah berupa kebijakan, ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi organisasi. Penjabaran selanjutnya adalah berupa program yaitu kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk dapat mewujudkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran tertentu sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Atas dasar arti dan makna strategi tersebut maka dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk 1 (satu) Tahun kedepan (2025-2026), ditetapkan strategi berupa kebijakan dan program sebagai berikut :

Tabel 2.4 Strategi dan Kebijakan

Strategi	Kebijakan
Mengurangi jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan meningkatkan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan, berkeadilan dan merata kepada masyarakat serta optimalisasi program pemberdayaan masyarakat	Penyelenggaraan perlindungan sosial dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
Meningkatkan peran serta masyarakat dan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Peningkatan pemberdayaan lembaga masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak perempuan dan anak	Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarustamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG
Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan	Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang
Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencangkup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulanganreintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif	Peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan implementasi kebijakan terkait pemenuhan hak anak

Keberhasilan pelaksanaan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk pada Tahun Anggaran 2025 melaksanakan 2 Urusan dengan didukung alokasi anggaran Rp23.733.163.929.00 antara lain :

Urusan Sosial

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Pemberdayaan Sosial

a. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
b. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

Program Rehabilitasi Sosial

a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penanganan Bencana

a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Program Perlindungan Perempuan

a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota
b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota *(anggaran pada sub kegiatan dinolkan ketika perubahan APBD Tahun 2025)*

Program Peningkatan Kualitas Keluarga

a. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
c. Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
b. Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota *(anggaran pada sub kegiatan dinolkan ketika perubahan APBD Tahun 2025)*

Program Perlindungan Khusus Anak

a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
b. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan

a. Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif
b. Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak

Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu satu tahun atau kurang, dalam rentang waktu masa Rencana Strategis (Tahunan, Semesteran, Tribulanan, atau Bulanan). Adapun penjabaran tujuan dalam bentuk sasaran-sasaran Rencana

Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk sebagai berikut:

Tabel 2.5 Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial PPPA

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	2	3
A	**Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif**	**Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)**
1	Meningkatnya Fungsi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Meningkat Kemampuan Fungsi Sosialnya (%)
2	Meningkatnya Peran PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang Aktif (%)
B	**Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak**	**Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)**
		Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)
1	Meningkatnya Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Pemberdayaan Gender (Indeks)
2	Meningkatnya Kapasitas dan Kolaborasi antar Lembaga Perlindungan Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)
		Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)

Sumber : Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 Dinas Sosial PPPA

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 tujuan dan 4 sasaran yang diampu untuk mendukung pencapaian 2 urusan yang diampu oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk yaitu, Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Tabel 2.6 Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Perencanaan Renstra 2025-2029	Target Tahun 2025
1	2	3	4	5
A	**Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif**	**Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)**	**Renstra 2025–2029**	**62.67**
1	Meningkatnya Fungsi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Meningkat Kemampuan Fungsi Sosialnya (%)	Renstra 2025–2029	49.95
2	Meningkatnya Peran PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang Aktif (%)	Renstra 2025–2029	75.24
B	**Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak**	**Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)**	**Renstra 2025–2029**	**94.28**
		Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)	**Renstra 2025–2029**	**70.35**

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Perencanaan Renstra 2025-2029	Target Tahun 2025
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Pemberdayaan Gender (Indeks)	Renstra 2025–2029	72.6
2	Meningkatnya Kapasitas dan Kolaborasi antar Lembaga Perlindungan Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	Renstra 2025–2029	65.6
		Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	Renstra 2025–2029	85.4

c. Rencana Kerja (Renja)

Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencakup program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 dengan mengacu pada dokumen Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2026. Rencana kerja memuat rencana tingkat hasil yang diharapkan pada setiap kegiatan yang dilaksanakan. Berikut disampaikan Kerangka Logis dan Cacading Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025, sebagai berikut:

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan tingkat keberhasilan kinerja yang harus dicapai setelah kegiatan ditetapkan dan tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Perjanjian kinerja merupakan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan dan bawahan dalam pemberian tanggungjawab kinerja . Perjanjian kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Perangkat Daerah.

2.2.1 Sasaran Kinerja Tahun 2025

Sasaran kinerja pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan sasaran kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

2.2.2 Standart Penilai Kinerja

Untuk mencapai Sasaran Meningkatnya Fungsi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Meningkat Kemampuan Fungsi Sosialnya didukung oleh Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, serta Program Penanganan Bencana, dan sasaran Meningkatnya Peran PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan Persentase PSKS yang Aktif didukung oleh Program Pemberdayaan Sosial dan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Untuk mencapai Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Gender (IDG) dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (Indeks) didukung oleh Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, dan Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dan sasaran Meningkatnya Kapasitas dan Kolaborasi antar Lembaga Perlindungan Anak dengan indikator Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) didukung oleh Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan Indikator Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) didukung oleh Program Khusus Anak.

Tabel 2.7 Sasaran Urusan Sosial dan PPPA Dinas Sosial PPPA

Tahun 2025

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Perencanaan Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	Target Tahun 2025
1	2	3	4	5
A	**Mengurangi Penduduk Miskin**	**Persentase Penduduk Miskin Ekstrim**	**Renstra 2024–2026**	**0.3**
1	Meningkatnya Ketercukupan Kebutuhan Dasar PPKS	Persentase PPKS yang Tercukupi Kebutuhan Dasarnya	Renstra 2024–2026	87
2	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	Renstra 2024–2026	72.6
3	Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak	Renstra 2024–2026	64
A	**Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif**	**Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)**	**Renstra 2025–2029**	**62.67**
1	Meningkatnya Fungsi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Meningkat Kemampuan Fungsi Sosialnya (%)	Renstra 2025–2029	49.95
2	Meningkatnya Peran PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang Aktif (%)	Renstra 2025–2029	75.24
B	**Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak**	**Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)**	**Renstra 2025–2029**	**94.28**
		Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)	**Renstra 2025–2029**	**70.35**
1	Meningkatnya Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Pemberdayaan Gender (Indeks)	Renstra 2025–2029	72.6
2	Meningkatnya Kapasitas dan Kolaborasi antar Lembaga Perlindungan Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	Renstra 2025–2029	65.6
		Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	Renstra 2025–2029	85.4

No.	Program	Anggaran		Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp	6.164.263.559,00	DAU - APBD
2	Pemberdayaan Sosial	Rp	340.144.100,00	DAU - APBD
3	Rehabilitasi Sosial	Rp	1.838.957.450,00	DAU - APBD
4	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp	13.632.086.700,00	DAU - APBD
5	Penanganan Bencana	Rp	363.200.050,00	DAU - APBD
6	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp	83.237.850,00	DAU - APBD
7	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp	256.196.300,00	DAU - APBD
8	Perlindungan Perempuan	Rp	317.453.700,00	DAU - APBD
9	Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp	164.779.700,00	DAU - APBD
10	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp	5.826.500,00	DAU - APBD
11	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp	195.608.800,00	DAU - APBD
12	Perlindungan Khusus Anak	Rp	371.409.220,00	DAU - APBD
Jumlah Total		**Rp**	**23.733.163.929,00**	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Pada pelaksanaan Program pembangunan pemerintah dalam mencapai kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Nganjuk mengukur capaian kinerja berdasarkan target yang sudah ditentukan. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis terhadap capaian indikator kinerja dengan kategori interval nilai sebagai berikut:

No	Interval Nilai	Capaian Kriteria
1	≥ 91 %	Tercapai
2	80% ≤ 90%	Tercapai dengan catatan
3	< 80%	Tidak tercapai

A.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Capaian Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 berdasarkan Tujuan dan Sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.1.1

Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Perencanaan Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	Target Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Ketercukupan Kebutuhan Dasar PPKS	Persentase PPKS yang Tercukupi Kebutuhan Dasarnya	Renstra 2024–2026	87	100	114.94
2	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	Renstra 2024–2026	72.6	68.09 (Tahun 2024)	93.79
3	Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak	Renstra 2024–2026	64	70.03 (Tahun 2024)	109.42
1	Meningkatnya Fungsi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Meningkat Kemampuan Fungsi Sosialnya (%)	Renstra 2025–2029	49.95	100.00	200.20

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Perencanaan Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	Target Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
2	Meningkatnya Peran PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang Aktif (%)	Renstra 2025–2029	75.24	74.59	99.14
1	Meningkatnya Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Pemberdayaan Gender (Indeks)	Renstra 2025–2029	72.6	68.09 (Tahun 2024)	93.79
2	Meningkatnya Kapasitas dan Kolaborasi antar Lembaga Perlindungan Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	Renstra 2025–2029	65.6	70.03 (Tahun 2024)	106.75
		Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	Renstra 2025–2029	85.4	86.05 (Tahun 2024)	100.76

Analisis terhadap pencapaian sasaran Renstra Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Sasaran ke-1 **“ Meningkatnya Ketercukupan Kebutuhan Dasar PPKS ”** diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Persentase PPKS yang Tercukupi Kebutuhan Dasarnya :

- Jumlah PPKS Tahun 2025 113.707 Orang
- Jumlah PPKS yang Tercukupi Kebutuhan Dasarnya Tahun 2025 113.707 Orang
- Jumlah Persentase PPKS yang Tercukupi Kebutuhan Dasarnya Tahun 2025 100%
- Target Renstra Tahun 2025 87 %
- Capaian Kinerja Tahun 2025 100%

Capaian Kinerja indikator ini sebesar 114,94% masuk dalam katagori tercapai, hal ini dikarenakan PPKS yang Tercukupi Kebutuhan Dasarnya Tahun 2025 berdasarkan jumlah data PPKS yang terlaporkan.

Sasaran ke-2 ” **Meningkatnya Kesetaraan Gender ”** diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2025	68,09 (th 2024)
Target Renstra Tahun 2025	72,6
Capaian Kinerja Tahun 2025	93,79%

Hasil Nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) diperoleh dari pengolahan data yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Nganjuk. Capaian pada indicator tersebut sebesar 93,79% masuk dalam kategori belum tercapai. Data realisasi masih beradasarkan data Tahun 2024 dikarenakan pada saat laporan disusun realisasi data Tahun 2025 belum tersedia.

Sasaran ke-3 **“ Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Hak Anak”** diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)

Nilai Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) tahun 2025	70,03 (th 2024)
Target Renstra Tahun 2025	64
Capaian Kinerja Tahun 2025	109,42%

Hasil Nilai Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) diperoleh dari pengolahan data yang dilakukan oleh Kementerian PPPA. Capaian pada indicator tersebut sebesar 109,42% masuk dalam kategori tercapai. Data realisasi masih beradasarkan data Tahun 2024 dikarenakan pada saat laporan disusun realisasi data Tahun 2025 belum tersedia.

Analisis terhadap pencapaian sasaran Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Sasaran ke-1 **“ Meningkatnya Fungsi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)”** diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Meningkat Kemampuan Fungsi Sosialnya :

- Jumlah PMKS/ PPKS Tahun 2025 113.707 Orang
- Jumlah PMKS/ PPKS yang Meningkat Kemampuan Fungsi SosialnyaTahun 2025 113.707 Orang
- Jumlah Persentase PMKS/ PPKS yang ditangani Tahun 2025 100%
- Target Renstra Tahun 2025 49,95 %

- Capaian Kinerja Tahun 2025 200,20%

Capaian Kinerja indikator ini sebesar 200,20% masuk dalam katagori tercapai dari target yang ditentukan sebesar 49,95%.

Sasaran ke-2 **“ Meningkatnya Peran PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial”** diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Persentase PSKS yang Aktif

- Jumlah PSKS yang ada Tahun 2025 492 Orang
- Jumlah PSKS yang aktif Tahun 2025 367 Orang
- Persentase Jumlah PSKS yang Aktif Tahun 2025 74,59 %
- Target Renstra Tahun 2025 75,24 %
- Capaian Kinerja Tahun 2025 99,14 %

Capaian Kinerja indikator ini sebesar 99,14 % masuk dalam katagori tercapai dari target yang ditentukan sebesar 75,24 %.

Berdasarkan tujuan di atas maka Sasaran ke-3 **“ Meningkatnya Pemberdayaan Gender (IDG)”** diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2025	68,09 (th 2024)
Target Renstra Tahun 2025	72,6
Capaian Kinerja Tahun 2025	93,79%

Hasil Nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) diperoleh dari pengolahan data yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Nganjuk. Capaian pada indicator tersebut sebesar 93,79% masuk dalam kategori belum tercapai. Data realisasi masih beradasarkan data Tahun 2024 dikarenakan pada saat laporan disusun realisasi data Tahun 2025 belum tersedia.

Sasaran ke-4 **“Meningkatnya Kapasitas dan Kolaborasi antar Lembaga Perlindungan Anak”** diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)

Nilai Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) tahun 2025	70,03 (th 2024)
Target Renstra Tahun 2025	65,6
Capaian Kinerja Tahun 2025	106,75%

Hasil Nilai Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) diperoleh dari pengolahan data yang dilakukan oleh Kementerian PPPA. Capaian pada indicator tersebut sebesar 106,75% masuk dalam kategori tercapai. Data realisasi masih beradasarkan data

Tahun 2024 dikarenakan pada saat laporan disusun realisasi data Tahun 2025 belum tersedia.

Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)

Nilai Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) tahun 2025	86,05 (th 2024)
Target Renstra Tahun 2025	85,4
Capaian Kinerja Tahun 2025	100,76%

Hasil Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) diperoleh dari pengolahan data yang dilakukan oleh Kementerian PPPA. Capaian pada indicator tersebut sebesar 100,76% masuk dalam kategori belum tercapai. Data realisasi masih beradasarkan data Tahun 2024 dikarenakan pada saat laporan disusun realisasi data Tahun 2025 belum tersedia.

A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Tahun (2024, 2023, 2022)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Perencanaan Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	Target Kinerja				Realisasi Kinerja			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Ketercukupan Kebutuhan Dasar PPKS	Persentase PPKS yang Tercukupi Kebutuhan Dasarnya	Renstra 2024–2026	-	-	85	87	-	-	100	100
2	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	Renstra 2024–2026	-	-	72.46	72.6	-	-	72,46 (th 2023)	68.09 (Tahun 2024)
3	Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak	Renstra 2024–2026	-	-	63.71	64	-	-	-	70.03 (Tahun 2024)
1	Meningkatnya Fungsi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Meningkat Kemampuan Fungsi Sosialnya (%)	Renstra 2025–2029	-	-	-	49.95	-	-	-	100.00
2	Meningkatnya Peran PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang Aktif (%)	Renstra 2025–2029	-	-	-	75.24	-	-	-	74.59
1	Meningkatnya Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Pemberdayaan Gender (Indeks)	Renstra 2025–2029	-	-	-	72.6	-	-	-	68.09 (Tahun 2024)
2	Meningkatnya Kapasitas dan Kolaborasi antar Lembaga Perlindungan Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	Renstra 2025–2029	-	-	-	65.6	-	-	-	70.03 (Tahun 2024)
		Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	Renstra 2025–2029	-	-	-	85.4	-	-	-	86.05 (Tahun 2024)

Analisis terhadap pencapaian sasaran Renstra Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Sasaran ke-1 **“ Meningkatnya Ketercukupan Kebutuhan Dasar PPKS ”** diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Persentase PPKS yang Tercukupi Kebutuhan Dasarnya :

- Jumlah PPKS Tahun 2025 113.707 Orang
- Jumlah PPKS Tahun 2024 57.158 Orang
- Jumlah PPKS yang Tercukupi Kebutuhan Dasarnya
- Tahun 2025 113.707 Orang
- Jumlah PPKS yang Tercukupi Kebutuhan Dasarnya Tahun 2024 57.158 Orang
- Jumlah Persentase PPKS yang Tercukupi Kebutuhan Dasarnya Tahun 2025 100%
- Jumlah Persentase PPKS yang Tercukupi Kebutuhan Dasarnya Tahun 2024 100%
- Target Renstra Tahun 2025 87 %
- Target Renstra Tahun 2024 100 %
- Capaian Kinerja Tahun 2025 114,94 %
- Capaian Kinerja Tahun 2024 100 %

Capaian Kinerja indikator ini sebesar 114,94 % masuk dalam katagori tercapai dari target yang ditentukan sebesar 87%. Bila dibandingkan dengan realisasi PPKS yang Tercukupi Kebutuhan Dasarnya tahun 2024 tetap sebesar 100 % dan capaian untuk kinerjanya naik sebesar 14,94% dari 100% menjadi 114,94% tetapi masih di atas target yang ditentukan.

Pada urusan sosial rata-rata menghasilkan nilai capaian di atas 114,94% dan berdasarkan skala ordinal predikat pencapaian sasaran yang diperoleh termasuk kategori “tercapai” kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah berhasil melakukan pelayanan bagi PPKS agar tercukupi kebutuhan dasarnya.

Sasaran ke-2 ” **Meningkatnya Kesetaraan Gender ”** diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2025	68,09 (th 2024)
Nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2024	72,46 (th 2023)
Target Renstra Tahun 2025	72,6
Target Renstra Tahun 2024	70,50

Capaian Kinerja Tahun 2025	93,79%
Capaian Kinerja Tahun 2024	102,78%

Capaian Kinerja indikator ini sebesar 93,79% masuk dalam katagori belum tercapai dari target yang ditentukan sebesar 72,6, bila dibandingkan dengan nilai indeks Tahun 2025 ada sedikit penurunan nilai indeks sebesar 4,37 dari 72,46 (th 2023) menjadi 68,09 (th 2024).

Sasaran ke-3 **“ Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Hak Anak”** diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)

Nilai Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) tahun 2025	70,03 (th 2024)
Nilai Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) tahun 2024	0
Target Renstra Tahun 2025	64
Target Renstra Tahun 2024	0
Capaian Kinerja Tahun 2025	109,42%
Capaian Kinerja Tahun 2024	0

Hasil nilai Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) diperoleh dari pengolahan data yang dilakukan oleh Kementerian PPPA. Capaian pada indicator tersebut sebesar 109,42% masuk dalam kategori tercapai. Nilai 0 dikarenakan pada Tahun 2024 belum mencantumkan Indeks Kesejahteraan Sosial sebagai Tujuan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk.

Pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak rata-rata menghasilkan nilai capaian di atas 101,60% dan berdasarkan skala ordinal predikat pencapaian sasaran yang diperoleh termasuk kategori “tercapai” kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah berhasil melakukan peningkatan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak.

Analisis terhadap pencapaian sasaran Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Sasaran ke-1 **“ Meningkatnya Fungsi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)”** diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Meningkat Kemampuan Fungsi Sosialnya :

- Jumlah PMKS/ PPKS Tahun 2025 113.707 Orang
- Jumlah PMKS/ PPKS yang Meningkat Kemampuan Fungsi SosialnyaTahun 2025 113.707 Orang
- Jumlah Persentase PMKS/ PPKS yang ditangani Tahun 2025 100%
- Target Renstra Tahun 2025 49,95 %
- Capaian Kinerja Tahun 2025 200,20%

Capaian Kinerja indikator ini sebesar 200,20% masuk dalam katagori tercapai dari target yang ditentukan sebesar 49,95%.

Sasaran ke-2 **“ Meningkatnya Peran PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial”** diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Persentase Jumlah PSKS yang Aktif

- Jumlah PSKS yang ada Tahun 2025 492 Orang
- Jumlah PSKS yang ada Tahun 2024 0 Orang
- Jumlah PSKS yang aktif Tahun 2025 367 Orang
- Jumlah PSKS yang aktif Tahun 2024 0 Orang
- Persentase Jumlah PSKS yang Aktif Tahun 2025 74,59 %
- Persentase Jumlah PSKS yang Aktif Tahun 2024 0 %
- Target Renstra Tahun 2025 75,24%
- Target Renstra Tahun 2024 0%
- Capaian Kinerja Tahun 2025 99,14 %
- Capaian Kinerja Tahun 2024 0 %

Capaian pada indicator tersebut sebesar 99,14% masuk dalam kategori tercapai. Capaian kinerja pada Tahun 2024 tidak dapat disajikan dikarenakan uraian sasaran berbeda dengan periode Renstra Tahun 2025-2029.

Pada urusan sosial rata-rata menghasilkan nilai capaian di atas 149,67% dan berdasarkan skala ordinal predikat pencapaian sasaran yang diperoleh termasuk kategori “tercapai” kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nganjuk

telah berhasil menekan bertambahnya PPKS serta meningkatkan pelayanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sebagaimana yang ditargetkan dalam renstra.

Sasaran ke-1 **“ Meningkatnya Pemberdayaan Gender (IDG)”** diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2025	68,09 (th 2024)
Nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2024	0
Target Renstra Tahun 2025	72,6
Target Renstra Tahun 2024	0
Capaian Kinerja Tahun 2025	93,79%
Capaian Kinerja Tahun 2024	0

Hasil nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) diperoleh dari pengolahan data yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nganjuk. Capaian pada indicator tersebut sebesar 93,79% masuk dalam kategori tercapai. Nilai 0 dikarenakan pada Tahun 2024 belum mencantumkan Indeks Kesejahteraan Sosial sebagai Tujuan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk.

Sasaran ke-2 **“Meningkatnya Kapasitas dan Kolaborasi antar Lembaga Perlindungan Anak”** diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)

Nilai Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) tahun 2025	70,03 (th 2024)
Nilai Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) tahun 2025	0
Target Renstra Tahun 2025	65,6
Target Renstra Tahun 2025	0
Capaian Kinerja Tahun 2025	106,75%
Capaian Kinerja Tahun 2025	0

Hasil nilai Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) diperoleh dari pengolahan data yang dilakukan oleh Kementerian PPPA. Capaian pada indicator tersebut sebesar 106,75% masuk dalam kategori tercapai. Nilai 0 dikarenakan pada Tahun 2024 belum mencantumkan Indeks Kesejahteraan Sosial sebagai Tujuan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk.

Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)

Nilai Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) tahun 2025	86,05 (th 2024)
Nilai Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) tahun 2025	0
Target Renstra Tahun 2025	85,4
Target Renstra Tahun 2025	0
Capaian Kinerja Tahun 2025	100,76%
Capaian Kinerja Tahun 2025	0

Hasil nilai Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) diperoleh dari pengolahan data yang dilakukan oleh Kementerian PPPA. Capaian pada indicator tersebut sebesar 100,76% masuk dalam kategori tercapai. Nilai 0 dikarenakan pada Tahun 2024 belum mencantumkan Indeks Kesejahteraan Sosial sebagai Tujuan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk.

Pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tertuang dalam sasaran menghasilkan nilai capaian sebesar 100,43% berdasarkan skala ordinal, sehingga predikat pencapaian sasaran yang diperoleh termasuk dalam kategori “tercapai”

A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir pada Dokumen Renstra

Tabel 3.1.3.1

Target Kinerja Renstra (berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026 dan Renstra Tahun 2025-2029)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Perencanaan Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	Target Renstra Tahun					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Ketercukupan Kebutuhan Dasar PPKS	Persentase PPKS yang Tercukupi Kebutuhan Dasarnya	Renstra 2024–2026	85	87	89	-	-	-
2	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	Renstra 2024–2026	72.46	72,6	72.89	-	-	-
3	Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak	Renstra 2024–2026	63.71	64	64.5	-	-	-
1	Meningkatnya Fungsi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Meningkat Kemampuan Fungsi Sosialnya (%)	Renstra 2025–2029	-	49.95	50,00	50,1	50,15	50,2
2	Meningkatnya Peran PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang Aktif (%)	Renstra 2025–2029	-	75.24	75,50	76,43	77,02	77,69
1	Meningkatnya Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Pemberdayaan Gender (Indeks)	Renstra 2025–2029	-	72.6	72,89	72,93	72,98	73,05
2	Meningkatnya Kapasitas dan Kolaborasi antar Lembaga Perlindungan Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	Renstra 2025–2029	-	65.6	65,6	65,65	65,7	65,75
		Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	Renstra 2025–2029	-	85.4	85,4	85,45	85,5	85,55

Tabel di atas merupakan Sasaran yang tertuang dalam Periode Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk dalam kurun waktu 3 Tahun sebagai pedoman perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 , yaitu pada Urusan Sosial mengampu 1 Sasaran dan Urusan PPPA 2 sasaran. Pada Periode Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk dalam kurun waktu 5 Tahun sebagai pedoman perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yaitu pada Urusan Sosial 2 sasaran sedangkan Urusan PPPA mengampu 2 sasaran.

Tabel 3.1.3.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Perencanaan Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	Target Akhir Renstra Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	Realisasi 2025	Tingkat Kemajuan (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Ketercukupan Kebutuhan Dasar PPKS	Persentase PPKS yang Tercukupi Kebutuhan Dasarnya	Renstra 2024–2026	89	100	112
2	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	Renstra 2024–2026	72.89	68.09 (Tahun 2024)	93.41
3	Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak	Renstra 2024–2026	64.5	70.03 (Tahun 2024)	108.57
1	Meningkatnya Fungsi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Meningkat Kemampuan Fungsi Sosialnya (%)	Renstra 2025–2029	50.2	100.00	199
2	Meningkatnya Peran PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang Aktif (%)	Renstra 2025–2029	77.69	74.59	96.01
1	Meningkatnya Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Pemberdayaan Gender (Indeks)	Renstra 2025–2029	73.05	68.09 (Tahun 2024)	93.21
2	Meningkatnya Kapasitas dan Kolaborasi antar Lembaga Perlindungan Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	Renstra 2025–2029	65.75	70.03 (Tahun 2024)	106.51
		Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	Renstra 2025–2029	85.55	86.05 (Tahun 2024)	100.58

Analisis terhadap pencapaian sasaran Renstra Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

Sasaran ke-1 **“ Meningkatnya Ketercukupan Kebutuhan Dasar PPKS ”** diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Persentase PPKS yang Tercukupi Kebutuhan Dasarnya :

- Jumlah PPKS Tahun 2025 113.707 Orang
- Jumlah PPKS yang Tercukupi Kebutuhan Dasarnya Tahun 2025 113.707 Orang
- Jumlah Persentase PPKS yang Tercukupi Kebutuhan Dasarnya Tahun 2025 100%
- Target Akhir Renstra Tahun 2025 89 %
- Capaian Kinerja Tahun 2025 112%

Capaian Kinerja indikator ini sebesar 112% masuk dalam katagori tercapai dari target akhir tahun renstra yang ditentukan sebesar 89% dengan realisasi Tahun 2025 sebesar 100%.

Sasaran ke-2 ” **Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender, serta Pemberdayaan Perempuan ”** diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2025	68,09 (th 2024)
Target Akhir Renstra Tahun 2025	72,89
Capaian Kinerja Tahun 2025	93,41%

Capaian Kinerja indikator ini sebesar 93,41% masuk dalam katagori tercapai dari target akhir tahun renstra yang ditentukan sebesar 72,89 dengan realisasi Tahun 2025 sebesar 68,09 (th 2024), hal ini masih berdasarkan data realisasi tahun 2024 dikarenakan pada saat penyusunan laporan data belum rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS) Nganjuk.

Sasaran ke-3 **“Meningkatnya Kapasitas dan Kolaborasi antar Lembaga Perlindungan Anak”** diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)

Nilai Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) tahun 2025	70,03 (th 2024)
Target Akhir Renstra	64,5
Capaian Kinerja Tahun 2025	108,57%

Capaian Kinerja indikator ini sebesar 108,57% masuk dalam katagori tercapai dari target akhir tahun renstra yang ditentukan sebesar 64,5 dengan realisasi Tahun

2025 sebesar 70,03 (th 2024), hal ini masih berdasarkan data realisasi tahun 2024 dikarenakan pada saat penyusunan laporan data belum rilis dari Kementerian PPPA.

Analisis terhadap pencapaian sasaran Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Sasaran ke-1 **" Meningkatnya Fungsi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)"** diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Meningkat Kemampuan Fungsi Sosialnya :

- Jumlah PMKS/ PPKS Tahun 2025 113.707 Orang
- Jumlah PMKS/ PPKS yang Meningkat Kemampuan Fungsi SosialnyaTahun 2025 113.707 Orang
- Jumlah Persentase PMKS/ PPKS yang ditangani Tahun 2025 100%
- Target Akhir Renstra 50,2 %
- Capaian Kinerja Tahun 2025 199%

Capaian Kinerja indikator ini sebesar 199% masuk dalam katagori tercapai dari target yang ditentukan sebesar 50,25%.

Sasaran ke-2 **" Meningkatnya Peran PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial"** diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Persentase PSKS yang Aktif

- Jumlah PSKS yang ada Tahun 2025 492 Orang
- Jumlah PSKS yang aktif Tahun 2025 367 Orang
- Persentase Jumlah PSKS yang Aktif Tahun 2025 74,59 %
- Target Akhir Renstra 77,69 %
- Capaian Kinerja Tahun 2025 96,01 %

Capaian Kinerja indikator ini sebesar 96,01% masuk dalam katagori tercapai dari target akhir tahun renstra yang ditentukan sebesar 78% dengan realisasi Tahun 2025 sebesar 74,59%.

Sasaran ke-3 **" Meningkatnya Pemberdayaan Gender (IDG)"** diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2025 68,09 (th 2024)
Target Akhir Renstra 73,05
Capaian Kinerja Tahun 2025 93,21%

Capaian Kinerja indikator ini sebesar 93,21% masuk dalam katagori belum tercapai dari target akhir tahun renstra yang ditentukan sebesar 73,05% dengan realisasi Tahun 2025 sebesar 70,03 (th 2024), hal ini masih berdasarkan data realisasi tahun 2024 dikarenakan pada saat penyusunan laporan data belum rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nganjuk.

Sasaran ke-4 **"Meningkatnya Kapasitas dan Kolaborasi antar Lembaga Perlindungan Anak"** diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)

Nilai Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) tahun 2025	70,03 (th 2024)
Target Akhir Renstra	65,75
Capaian Kinerja Tahun 2025	106,51%

Capaian Kinerja indikator ini sebesar 106,51% masuk dalam katagori tercapai dari target akhir tahun renstra yang ditentukan sebesar 65,75 dengan realisasi Tahun 2025 sebesar 70,03 (th 2024), hal ini masih berdasarkan data realisasi tahun 2024 dikarenakan pada saat penyusunan laporan data belum rilis dari Kementerian PPPA.

Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)

Nilai Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) tahun 2025	86,05 (th 2024)
Target Akhir Renstra	85,55
Capaian Kinerja Tahun 2025	100,58%

Capaian Kinerja indikator ini sebesar 100,58% masuk dalam katagori tercapai dari target akhir tahun renstra yang ditentukan sebesar 85,55 dengan realisasi Tahun 2025 sebesar 86,05 (th 2024), hal ini masih berdasarkan data realisasi tahun 2024 dikarenakan pada saat penyusunan laporan data belum rilis dari Kementerian PPPA.

A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standard Nasional (Minimal dengan Regional/Provinsi/kabupaten yang berbatasan)

Perbandingan realisasi kinerja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Level Nasional Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.1.4.1

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standard Nasional

(Berdasarkan Renstra 2024-2026)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Standar Nasional / Provinsi			Realisasi 2025	Posisi Kinerja
			Nasional	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Kediri		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Ketercukupan Kebutuhan Dasar PPKS	Persentase PPKS yang Tercukupi Kebutuhan Dasarnya					
2	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	77,62 (Tahun 2024)	75,32 (Tahun 2024)	72.82 (Tahun 2024)	68.09 (Tahun 2024)	di bawah
3	Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak	68,87 (Tahun 2024)	74,06 (Tahun 2024)	73.85 (Tahun 2024)	70.03 (Tahun 2024)	di bawah

Berdasarkan realisasi tingkat daerah sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Tahun 2024-2026 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk terdapat 3 sasaran yaitu, *Pertama*, Meningkatnya Ketercukupan Kebutuhan Dasar PPKS tidak dapat dibandingkan dengan tingkat nasional dan kabupaten. *Kedua*, Meningkatnya Kesetaraan Gender dengan Indeks Pemberdayaan Gender (Indeks) realisasi sebesar 68.09 (Tahun 2024), jika disandingkan dengan realisasi Tingkat Nasional sebesar 77,62 (Tahun 2024), Provinsi Jawa Timur sebesar 75,32 (Tahun 2024), Kabupaten Kediri Sebesar 73.85 (Tahun 2024) maka Kabupaten Nganjuk berada pada level di bawah. *Ketiga*, Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Hak Anak dengan indikator Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks) realisasi sebesar 70.03 (Tahun 2024), jika disandingkan dengan realisasi Tingkat Nasional sebesar 68,87 (Tahun 2024) Kabupaten Nganjuk pada level atas. Sedangkan jika disandingkan dengan Provinsi Jawa Timur sebesar 74,06 (Tahun 2024) dan Kabupaten Kediri Sebesar 73.85 (Tahun 2024) maka Kabupaten Nganjuk berada pada level di bawah

Tabel 3.1.4.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standard Nasional

(berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Standar Nasional / Provinsi			Realisasi 2025	Posisi Kinerja
			Nasional	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Kediri		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Fungsi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Meningkat Kemampuan Fungsi Sosialnya (%)					
2	Meningkatnya Peran PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang Aktif (%)					
1	Meningkatnya Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Pemberdayaan Gender (Indeks)	77,62 (Tahun 2024)	75,32 (Tahun 2024)	72.82 (Tahun 2024)	68.09 (Tahun 2024)	di bawah
2	Meningkatnya Kapasitas dan Kolaborasi antar Lembaga Perlindungan Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	68,87 (Tahun 2024)	74,06 (Tahun 2024)	73.85 (Tahun 2024)	70.03 (Tahun 2024)	di bawah
		Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	80,32 (Tahun 2024)	82,19 (Tahun 2024)	79.35(Tahun 2024)	86.05 (Tahun 2024)	di atas

Berdasarkan realisasi tingkat daerah sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk terdapat 2 tujuan yaitu, *kesatu*, Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif dengan Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks) realisasi sebesar 59,29, jika disandingkan dengan realisasi Tingkat Nasional sebesar 0 dan Provinsi Jawa Timur sebesar 58,73, Kabupaten Nganjuk masih berada pada level atas sedangkan jika disandingkan dengan Kabupaten Kediri Sebesar 60.23 maka Kabupaten Nganjuk berada pada level di bawah. Pada Tujuan *kedua*, Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak dengan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks) realisasi sebesar 91.32 (Tahun 2024), jika disandingkan dengan realisasi Tingkat Nasional sebesar 91,85 (Tahun 2024), Provinsi Jawa Timur sebesar 92,19 (Tahun 2024) dan Kabupaten Kediri Sebesar 93.41 (Tahun 2024) maka Kabupaten Nganjuk berada pada level di bawah. Sedangkan indikator Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks) realisasi sebesar 72.98 (Tahun 2024), jika disandingkan dengan realisasi Tingkat Nasional sebesar 71,02 (Tahun 2024)

Kabupaten Nganjuk berada pada Level atas sedangkan jika disandingkan dengan Provinsi Jawa Timur sebesar 75,62 (Tahun 2024) dan Kabupaten Kediri Sebesar 74.92 (Tahun 2024) maka Kabupaten Nganjuk berada pada level di bawah.

Pada Urusan PPPA terdapat 2 Urusan yaitu, *kesatu*, Meningkatnya Pemberdayaan Gender (IDG) dengan Indeks Pemberdayaan Gender (Indeks) realisasi sebesar 68.09 (Tahun 2024), jika disandingkan dengan realisasi Tingkat Nasional sebesar 77,62 (Tahun 2024), Provinsi Jawa Timur sebesar 75,32 (Tahun 2024), Kabupaten Kediri Sebesar 73.85 (Tahun 2024) maka Kabupaten Nganjuk berada pada level di bawah. Pada sasaran *kedua*, Meningkatnya Kapasitas dan Kolaborasi antar Lembaga Perlindungan Anak dengan indikator Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks) realisasi sebesar 70.03 (Tahun 2024), jika disandingkan dengan realisasi Tingkat Nasional sebesar 68,87 (Tahun 2024) Kabupaten Nganjuk pada level atas. Sedangkan jika disandingkan dengan Provinsi Jawa Timur sebesar 74,06 (Tahun 2024) dan Kabupaten Kediri Sebesar 73.85 (Tahun 2024) maka Kabupaten Nganjuk berada pada level di bawah. Indikator Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks) realisasi sebesar 86.05 (Tahun 2024), jika disandingkan dengan realisasi Tingkat Nasional sebesar 80,32 (Tahun 2024), Provinsi Jawa Timur sebesar 82,19 (Tahun 2024) dan Kabupaten Kediri Sebesar 79.35 (Tahun 2024) maka Kabupaten Nganjuk berada pada level di atas.

A.5 Analisis Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.1.5

Keberhasilan/ Kegagalan Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Perencanaan Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)	Faktor Pendukung atau penghambat	Alternatif Solusi
1	2	3	4	5	6	7	7	8
1	Meningkatnya Ketercukupan Kebutuhan Dasar PPKS	Persentase PPKS yang Tercukupi Kebutuhan Dasarnya	Renstra 2024–2026	87	100	114.94	**Faktor Pendukung :** Ketersediaan anggaran dan sarpras ; Program yang terstruktur ; cakupan program kemasyarakat yang lebih fokus.	
2	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	Renstra 2024–2026	72.6	68.09 (Tahun 2024)	93,79	**Faktor Pendukung: Program SAPA MAMA (Sekolah Perempuan, Anak dan Masyarakat Marjinal)**: Inisiatif ini mendorong perempuan, anak dan disabilitas untuk berani tampil dan memimpin serta mengutarakan pendapatnya yang patut untuk diperhitungkan. **UMKM Perempuan yang Kuat**: Sektor industri rumah tangga (seperti kerajinan dan olahan bawang merah) banyak digerakkan oleh perempuan Nganjuk, untuk meningkatkan kontribusi pendapatan keluarga. **Keterbukaan Politik Lokal:** Mulai terbukanya keterwakilan perempuan di	**Mentorship Kepemimpinan Perempuan:** Membuat program pelatihan kepemimpinan (Leadership Camp) bagi kader perempuan di desa agar mereka berani mencalonkan diri sebagai Kepala Desa atau perangkat desa. **Penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG):** Memastikan setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Nganjuk mengalokasikan anggaran pembangunan responsif gender yang sasarannya lebih mengutamakan kepentingan perempuan dan anak, bukan sekadar program umum. **Penyediaan Fasilitas Publik Ramah Perempuan**:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Perencanaan Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)	Faktor Pendukung atau penghambat	Alternatif Solusi
1	2	3	4	5	6	7	7	8
							kursi legislatif (DPRD) dan kepala desa dan manajerial di Nganjuk sehingga memperkuat skor pemberdayaan perempuan di bidang politik. **Faktor Penghambat:** Budaya Patriaki & Stereotip: Masih ada pandangan tradisional di sebagian masyarakat bahwa posisi pemimpin atau pengambil keputusan utama lebih baik dipegang laki-laki. **Beban Ganda (Double Burden)**: Perempuan seringkali sulit mengambil peran manajerial karena masih memikul beban utama pekerjaan domestik (rumah tangga), sehingga sulit membagi waktu untuk karier atau politik. **Minimnya Keterwakilan Perempuan di Eselon Tinggi**: Meski secara jumlah ASN perempuan banyak, tetapi jumlah yang menduduki jabatan pimpinan tinggi (Eselon II) masih belum ideal dibanding laki-laki.	Menyediakan fasilitas kebutuhan perempuan seperti ruang laktasi dan tempat penitipan anak (Day Care) terutama di perkantoran dan pasar tradisional. Hal ini penting untuk mengatasi hambatan "Beban Ganda", sehingga perempuan tetap bisa bekerja/berpolitik tanpa meninggalkan perannya sebagai ibu.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Perencanaan Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)	Faktor Pendukung atau penghambat	Alternatif Solusi
1	2	3	4	5	6	7	7	8
3	Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak	Renstra 2024–2026	64	70.03 (Tahun 2024)	109.42	**Faktor Pendukung:** Adanya komitmen dan koordinasi antar lembaga perlindungan anak yang semakin baik dalam pemenuhan hak anak.	
1	Meningkatnya Fungsi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Meningkat Kemampuan Fungsi Sosialnya (%)	Renstra 2025–2029	49.95	100.00	200.20	**Faktor Pendukung:** PPKS yang terlapor dapat tertangani sesuai dengan layanan yang dibutuhkan	
2	Meningkatnya Peran PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang Aktif (%)	Renstra 2025–2029	75.24	74.59	99.14	**Faktor Pendukung:** Motivasi kemanusiaan dari para PSKS sebagai panggilan kemanusiaan dan Koordinasi baik antara Dinas Sosial dan OPD dengan para PSKS **Faktor Penghambat:** kurangnya SDM menghadapi beban kerja dan wilayah yang luas serta adanya efisiensi anggaran menyebabkan berkurangnya jumlah sasaran	Menyelenggaranan peningkatan kemampuan potensi PSKS dan menjalin koordinasi dan memberi motivasi kepada PSKS
1	Meningkatnya Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Pemberdayaan Gender (Indeks)	Renstra 2025–2029	72.6	68.09 (Tahun 2024)	93.79	**Faktor Pendukung: Program SAPA MAMA (Sekolah Perempuan, Anak dan Masyarakat Marjinal)**: Inisiatif ini mendorong perempuan, anak dan disabilitas untuk berani tampil dan memimpin serta	**Mentorship Kepemimpinan Perempuan:** Membuat program pelatihan kepemimpinan (Leadership Camp) bagi kader perempuan di desa agar mereka berani mencalonkan diri sebagai Kepala Desa atau perangkat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Perencanaan Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)	Faktor Pendukung atau penghambat	Alternatif Solusi
1	2	3	4	5	6	7	7	8
							mengutarakan pendapatnya yang patut untuk diperhitungkan. **UMKM Perempuan yang Kuat**: Sektor industri rumah tangga (seperti kerajinan dan olahan bawang merah) banyak digerakkan oleh perempuan Nganjuk, untuk meningkatkan kontribusi pendapatan keluarga. **Keterbukaan Politik Lokal:** Mulai terbukanya keterwakilan perempuan di kursi legislatif (DPRD) dan kepala desa dan manajerial di Nganjuk sehingga memperkuat skor pemberdayaan perempuan di bidang politik. **Faktor Penghambat:** Budaya Patriaki & Stereotip: Masih ada pandangan tradisional di sebagian masyarakat bahwa posisi pemimpin atau pengambil keputusan utama lebih baik dipegang laki-laki. **Beban Ganda (Double Burden)**: Perempuan seringkali sulit mengambil peran manajerial karena	desa. **Penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG):** Memastikan setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Nganjuk mengalokasikan anggaran pembangunan responsif gender yang sasarannya lebih mengutamakan kepentingan perempuan dan anak, bukan sekadar program umum. **Penyediaan Fasilitas Publik Ramah Perempuan**: Menyediakan fasilitas kebutuhan perempuan seperti ruang laktasi dan tempat penitipan anak (Day Care) terutama di perkantoran dan pasar tradisional. Hal ini penting untuk mengatasi hambatan "Beban Ganda", sehingga perempuan tetap bisa bekerja/berpolitik tanpa meninggalkan perannya sebagai ibu.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Perencanaan Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)	Faktor Pendukung atau penghambat	Alternatif Solusi
1	2	3	4	5	6	7	7	8
							masih memikul beban utama pekerjaan domestik (rumah tangga), sehingga sulit membagi waktu untuk karier atau politik. **Minimnya Keterwakilan Perempuan di Eselon Tinggi**: Meski secara jumlah ASN perempuan banyak, tetapi jumlah yang menduduki jabatan pimpinan tinggi (Eselon II) masih belum ideal dibanding laki-laki.	
2	Meningkatnya Kapasitas dan Kolaborasi antar Lembaga Perlindungan Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	Renstra 2025–2029	65.6	70.03 (Tahun 2024)	106.75	**Faktor Pendukung:** Adanya komitmen dan koordinasi antar lembaga perlindungan anak yang semakin baik dalam pemenuhan hak anak.	
		Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	Renstra 2025–2029	85.4	86.05 (Tahun 2024)	100.76	**Faktor Pendukung:** Meningkatnya koordinasi dan kerja sama antar lembaga perlindungan anak dalam penanganan kasus anak.	

Berdasarkan tabel 3.1.5, adapun faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja tujuan dan sasaran pada Renstra Tahun 2024-2026 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu:

Urusan Sosial

Sasaran : Meningkatnya Ketercukupan Kebutuhan Dasar PPKS

Indikator : Persentase PPKS yang Tercukupi Kebutuhan Dasarnya

Faktor pendukung pada sasaran di atas adalah Ketersediaan anggaran dan sarpras ; Program yang terstruktur ; cakupan program kemasyarakat yang lebih fokus.

Urusan PPPA

Sasaran : Meningkatnya Kesetaraan Gender

Indikator : Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Faktor Pendukung: **Program SAPA MAMA (Sekolah Perempuan, Anak dan Masyarakat Marjinal)**: Inisiatif ini mendorong perempuan, anak dan disabilitas untuk berani tampil dan memimpin serta mengutarakan pendapatnya yang patut untuk diperhitungkan. **UMKM Perempuan yang Kuat**: Sektor industri rumah tangga (seperti kerajinan dan olahan bawang merah) banyak digerakkan oleh perempuan Nganjuk, untuk meningkatkan kontribusi pendapatan keluarga. **Keterbukaan Politik Lokal**: Mulai terbukanya keterwakilan perempuan di kursi legislatif (DPRD) dan kepala desa dan manajerial di Nganjuk sehingga memperkuat skor pemberdayaan perempuan di bidang politik.

Faktor Penghambat: **Budaya Patriaki & Stereotip**: Masih ada pandangan tradisional di sebagian masyarakat bahwa posisi pemimpin atau pengambil keputusan utama lebih baik dipegang laki-laki. **Beban Ganda (Double Burden)**: Perempuan seringkali sulit mengambil peran manajerial karena masih memikul beban utama pekerjaan domestik (rumah tangga), sehingga sulit membagi waktu untuk karier atau politik. **Minimnya Keterwakilan Perempuan di Eselon Tinggi**: Meski secara jumlah ASN perempuan banyak, tetapi jumlah yang menduduki jabatan pimpinan tinggi (Eselon II) masih belum ideal dibanding laki-laki.

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Hak Anak

Indikator : Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)

Faktor Pendukung: Adanya komitmen dan koordinasi antar lembaga perlindungan anak yang semakin baik dalam pemenuhan hak anak.

Adapun faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja tujuan dan sasaran pada Renstra Tahun 2025-2029 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu

Urusan Sosial

Sasaran : Meningkatnya Fungsi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Indikator : Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Meningkat Kemampuan Fungsi Sosialnya

Faktor Pendukung: PPKS yang terlapor dapat tertangani sesuai dengan layanan yang dibutuhkan

Sasaran : Meningkatnya Peran PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Indikator : Persentase PSKS yang Aktif

Faktor Pendukung: Motivasi kemanusiaan dari para PSKS sebagai panggilan kemanusiaan dan Koordinasi baik antara Dinas Sosial dan OPD dengan para PSKS.

Faktor Penghambat: kurangnya SDM menghadapi beban kerja dan wilayah yang luas serta adanya efisiensi anggaran menyebabkan berkurangnya jumlah sasaran

Urusan PPPA

Sasaran : Meningkatnya Pemberdayaan Gender (IDG)

Indikator : Indeks Pemberdayaan Gender (Indeks)

Faktor Pendukung: **Program SAPA MAMA (Sekolah Perempuan, Anak dan Masyarakat Marjinal)**: Inisiatif ini mendorong perempuan, anak dan disabilitas untuk berani tampil dan memimpin serta mengutarakan pendapatnya yang patut untuk diperhitungkan. **UMKM Perempuan yang Kuat**: Sektor industri rumah tangga (seperti kerajinan dan olahan bawang merah) banyak digerakkan oleh perempuan Nganjuk, untuk meningkatkan kontribusi pendapatan keluarga. **Keterbukaan Politik Lokal**: Mulai terbukanya keterwakilan perempuan di kursi legislatif (DPRD) dan kepala desa dan manajerial di Nganjuk sehingga memperkuat skor pemberdayaan perempuan di bidang politik.

Faktor Penghambat: **Budaya Patriaki & Stereotip**: Masih ada pandangan tradisional di sebagian masyarakat bahwa posisi pemimpin atau pengambil keputusan utama lebih baik dipegang laki-laki. **Beban Ganda (Double Burden)**: Perempuan seringkali sulit mengambil peran manajerial karena masih memikul beban utama pekerjaan domestik (rumah tangga), sehingga sulit membagi waktu untuk karier atau politik. **Minimnya Keterwakilan Perempuan di Eselon Tinggi**: Meski secara jumlah

ASN perempuan banyak, tetapi jumlah yang menduduki jabatan pimpinan tinggi (Eselon II) masih belum ideal dibanding laki-laki.

Sasaran : Meningkatnya Kapasitas dan Kolaborasi antar Lembaga Perlindungan Anak

Indikator : Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)

Faktor Pendukung: Adanya komitmen dan koordinasi antar lembaga perlindungan anak yang semakin baik dalam pemenuhan hak anak.

Indikator : Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)

Faktor Pendukung: Meningkatnya koordinasi dan kerja sama antar lembaga perlindungan anak dalam penanganan kasus anak.

A.6 Analisis atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.1.6

Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Perencanaan Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efesiensi
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Ketercukupan Kebutuhan Dasar PPKS	Persentase PPKS yang Tercukupi Kebutuhan Dasarnya	Renstra 2024–2026	114.94	67.25	47.69
2	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	Renstra 2024–2026	93.79	67.25	26.54
3	Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak	Renstra 2024–2026	109.42	67.25	42.17
1	Meningkatnya Fungsi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Meningkat Kemampuan Fungsi Sosialnya (%)	Renstra 2025–2029	200.20	85.61	114.59
2	Meningkatnya Peran PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang Aktif (%)	Renstra 2025–2029	99.14	85.61	13.53
1	Meningkatnya Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Pemberdayaan Gender (Indeks)	Renstra 2025–2029	93.79	85.61	8.18
2	Meningkatnya Kapasitas dan Kolaborasi antar Lembaga Perlindungan Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	Renstra 2025–2029	106.75	85.61	21.14
		Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	Renstra 2025–2029	100.76	85.61	15.15

Analisis Efesiensi Sumber Daya dengan Realisasi Anggaran berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Sosial

Sasaran : Meningkatnya Ketercukupan Kebutuhan Dasar PPKS

Indikator Sasaran : Persentase PPKS yang Tercukupi Kebutuhan Dasarnya

Indikator sasaran di atas didukung oleh 6 (enam) Program, 15 (lima belas) Kegiatan, dan 40 (empat puluh) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp22.421.889.709,00 terealisasi sebesar Rp19.282.000.662,00 atau 86,00%.

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sasaran : Meningkatnya Kesetaraan Gender

Indikator Sasaran : Indeks Pemberdayaan Gender

Indikator sasaran di atas didukung oleh 3 (tiga) Program, 7 (tujuh) Kegiatan, dan 10 (sepuluh) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp426.802.500,00 terealisasi sebesar Rp408.066.935,00 atau 95,61%.

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Hak Anak

Indikator Sasaran : Indeks Pemenuhan Hak Anak

Indikator sasaran di atas didukung oleh 3 (tiga) Program, 6 (enam) Kegiatan, dan 10 (sepuluh) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp884.471.720,00 terealisasi sebesar Rp628.838.448,00 atau 71,10%.

Analisis Efesiensi Sumber Daya dengan Realisasi Anggaran berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Sosial

Sasaran : **Meningkatnya Fungsi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**

Indikator Sasaran : **Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Meningkat Kemampuan Fungsi Sosialnya**

Indikator sasaran di atas didukung oleh 4 (empat) Program, 12 (dua belas) Kegiatan, dan 35 (tiga puluh lima) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp21.998.507.759,00 terealisasi sebesar Rp18.881.322.162,00 atau 85,83%.

Sasaran : Meningkatnya Peran PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Indikator Sasaran : Persentase PSKS yang Aktif

Indikator sasaran di atas didukung oleh 2 (dua) Program, 3 (tiga) Kegiatan, dan 5 (lima) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp423.381.950,00 terealisasi sebesar Rp400.678.500,00 atau 94,64%.

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sasaran : Meningkatnya Pemberdayaan Gender (IDG)

Indikator Sasaran : Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indikator sasaran di atas didukung oleh 4 (empat) Program, 9 (sembilan) Kegiatan, dan 13 (tiga belas) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp744.256.200,00 terealisasi sebesar Rp640.354.672,00 atau 86,04%.

Sasaran : Meningkatnya Kapasitas dan Kolaborasi antar Lembaga Perlindungan Anak

Indikator Sasaran : Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)

Indikator sasaran di atas didukung oleh 1 (satu) Program, 1 (satu) Kegiatan, dan 2 (dua) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp195.608.800,00 terealisasi sebesar Rp176.894.298,00 atau 90,43%.

Indikator Sasaran : Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)

Indikator sasaran di atas didukung oleh 1 (satu) Program, 3 (tiga) Kegiatan, dan 5 (lima) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp371.409.220,00 terealisasi sebesar Rp219.656.413,00 atau 59,14%.

A.7 Analisis Program/ Kegiatan Penunjang Keberhasilan/ Kegagalan

Tabel 3.1.7

Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan, Kegagalan Pencapaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Perencanaan Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target 2025		Realisasi		Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7		8		9
A	**Meningkatnya Ketercukupan Kebutuhan Dasar PPKS**	**Persentase PPKS yang Tercukupi Kebutuhan Dasarnya**	**Renstra 2024–2026**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						
			Renstra 2024–2026	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**78**	**Nilai**	**78.20**	**Nilai**	**100%**
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Persentase Dokumen atau Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Terpenuhi	78	%	100.00	%	128%
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Persentase Dokumen atau Laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun	78	%	83.64	%	107%
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Persentase Dokumen atau Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun	78	%	99.99	%	128%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Persentase Paket atau Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun	78	%	183.33	%	235%
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Persentase Barang Milik Daerah SKPD yang Diadakan	78	%	100.00	%	128%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Perencanaan Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target 2025	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	78 %	111.76 %	143%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan\ Pemerintahan Daerah	Jumlah Persentase Barang Milik Daerah SKPD yang Terawat	78 %	55.55 %	71%
			Renstra 2024–2026	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase PSKS yang mendapat pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial**	**85 %**	**100.00 %**	**118%**
				Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Izin Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	85 %	0.00 %	0%
				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	85 %	88.23 %	104%
			Renstra 2024–2026	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase Rehabilitasi Sosial bagi PPKS/ PMKS**	**85 %**	**100.00 %**	**118%**
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, dan Gepeng yang Mendapatkan Layanan Sosial di Luar Panti	85 %	100.00 %	118%
				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PPKS/ PMKS yang Mendapatkan Layanan Sosial Dasar di Luar Panti	85 %	100.00 %	118%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Perencanaan Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target 2025	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	**Persentase PPKS/ PMKS Penerima Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**85 %**	**96.40 %**	**113%**
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin yang Telah di Verval	85 %	96.40 %	113%
				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	**Persentase PPKS/ PMKS Korban Bencana yang Ditangani**	**85 %**	**93.94 %**	**111%**
				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	85 %	89.25 %	105%
				Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Mendapatkan Pemberdayaan Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	85 %	123.33 %	145%
			Renstra 2024–2026	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase Pengelolaan TMP**	**85 %**	**100.00 %**	**118%**
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan TMP	85 %	100.00 %	118%
B			**Renstra 2024–2026**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	Meningkatnya Kesetaraan Gender	**Indeks Pemberdayaan Gender**	**Renstra 2024–2026**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase Program Responsif Gender pada Lembaga Pemerintah**	**100 %**	**100.00 %**	**100%**
				Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada	Jumlah PD yang Mendapatkan Pembinaan Pelembagaan PUG	100 %	100.00 %	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Perencanaan Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target 2025	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				
				Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	100 %	100.00 %	100%
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Mendapatkan Penguatan dan Pengembangan	100 %	98.04 %	98%
	Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Hak Anak	**Indeks Pemenuhan Hak Anak**	**Renstra 2024–2026**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase Layanan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Diskriminasi terhadap Perempuan**	**100 %**	**100.00 %**	**100%**
				Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Ditangani	100 %	120.00 %	120%
				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Rujukan yang Ditangani	100 %	14 %	14%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Perencanaan Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target 2025	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya Kesetaraan Gender	**Indeks Pemberdayaan Gender**	**Renstra 2024–2026**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase Lembaga/ Keluarga yang Mendapat Layanan Responsif Gender**	**100 %**	**100.00 %**	**100%**
				Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang Mendapatkan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	100.00 %	100%
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Mendapatkan Penguatan dan Pengembangan	100 %	200.00 %	200%
				Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan KG dan Hak Anak	100 %	129.09 %	129%
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	**Persentase Perangkat Daerah yang Mempunyai Data Gender dan Anak**	**100 %**	**100.00 %**	**100%**
				Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Menghimpun Data Gender serta Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	100 %	100.00 %	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Perencanaan Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target 2025		Realisasi		Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7		8		9
	Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Hak Anak	**Indeks Pemenuhan Hak Anak**	**Renstra 2024–2026**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase Kecamatan yang Mendapatkan Predikat Kecamatan Layak Anak**	**100**	**%**	**55.00**	**%**	**55%**
				Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Kelembagaan PHA	100	%	150.00	%	150%
			Renstra 2024–2026	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase Layanan terhadap Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus**	**100**	**%**	**100.00**	**%**	**100%**
				Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak yang Ditangani	100	%	200	%	200%
				Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Pelayanan Perlindungan Khusus Anak	100	%	96.55	%	97%
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	%	98.75	%	99%
	Meningkatnya Perlindungan	Indeks Kesejahteraan Sosial	Renstra Tahun 2025-2029	**Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**						
				Urusan Pemerintahan Bidang Sosial						

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Perencanaan Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target 2025		Realisasi		Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7		8		9
	Sosial yang Adaptif									
	Meningkatnya Fungsi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Meningkat Kemampuan Fungsi Sosialnya (%)	Renstra Tahun 2025-2029	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)**	**78**	**Nilai**	**78.20**	**Nilai**	**100%**
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	Lapora n	4	Laporan	100%
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	Lapora n	4	Laporan	100%
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	24	Orang/ Bulan	19	Orang/ Bulan	79%
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	Dokum en	12	Dokum en	100%
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	Lapora n	1	Lapora n	100%
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	Lapora n	18	Lapora n	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Perencanaan Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target 2025		Realisasi		Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7		8		9
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	Dokumen	1	Dokumen	100%
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2	Orang	2	Orang	100%
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	20	Orang	20	Orang	100%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	Paket	3	Paket	150%
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	Paket	4	Paket	100%
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	Paket	4	Paket	200%
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	Dokum en	3	Dokum en	300%
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2	Lapora n	4	Lapora n	200%
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	Lapora n	4	Lapora n	400%
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	Unit	1	Unit	100%
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	Unit	4	Unit	200%
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	Lapora n	3	Lapora n	150%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Perencanaan Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target 2025		Realisasi		Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7		8		9
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	Lapora n	4	Lapora n	133%
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	Lapora n	12	Lapora n	100%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan\ Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	30	Unit	30	Unit	100%
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	50	Unit	2	Unit	4%
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	25	Unit	25	Unit	100%
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	Unit	3	Unit	100%
	Meningkatnya Peran PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang Aktif (%)	Renstra Tahun 2025-2029	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase TKSK yang Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (%)**	**100**	**%**	**100.00**	**%**	**100%**
				Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	4	Dokumen	0	Dokumen	0%
				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	80	Orang	80%
					Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20	Orang	20	Orang	100%
					Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat	50	Lembaga	50	Lembaga	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Perencanaan Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target 2025		Realisasi		Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7		8		9
					Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)					
	Meningkatnya Fungsi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Meningkat Kemampuan Fungsi Sosialnya (%)	Renstra Tahun 2025-2029	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti (%)**	**65**	**%**	**100.00**	**%**	**154%**
					Persentase PPKS di luar SPM kecuali HIV/ AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	**65**	**%**	**100.00**	**%**	**154%**
					Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti (%)	**65**	**%**	**100.00**	**%**	**154%**
					Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti (%)	**65**	**%**	**100.00**	**%**	**154%**
					Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti (%)	**65**	**%**	**100.00**	**%**	**154%**
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	125	Orang	25	Orang	20%
					Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	430	Orang	325	Orang	76%
				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	2000	Orang	2,195	Orang	110%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Perencanaan Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target 2025		Realisasi		Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7		8		9
				NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	110	Orang	94	Orang	85%
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (Dokumen)	23	Dokumen	0	Dokumen	0%
	Meningkatnya Fungsi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Meningkat Kemampuan Fungsi Sosialnya (%)	Renstra Tahun 2025-2029	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)**	**70**	**%**	**96.40**	**%**	**138%**
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	1654	Orang	1,654	Orang	100%
					Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	198839	Keluarga	198,839	Keluarga	100%
					Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	8985	Keluarga	3,093	Keluarga	34%
	Meningkatnya Fungsi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Meningkat Kemampuan Fungsi Sosialnya (%)	Renstra Tahun 2025-2029	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (%)**	**70**	**%**	**93.94**	**%**	**134%**
				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	400	Orang	357	Orang	89%
				Penyelenggaraan Pemberdayaan	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi,	18	Orang	60	Orang	333%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Perencanaan Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target 2025		Realisasi		Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7		8		9
				Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)					
	Meningkatnya Peran PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang Aktif (%)	Renstra Tahun 2025-2029	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase TMP yang terkelola dengan baik (%)**	**100**	**%**	**100.00**	**%**	**100%**
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)	562	Makam	562	Makam	100%
	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	**Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)**	Renstra Tahun 2025-2029	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						
		Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)	Renstra Tahun 2025-2029	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						
	Meningkatnya Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Pemberdayaan Gender (Indeks)	Renstra Tahun 2025-2029	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase ARG (%)**	**28.5**	**%**	**28.31**	**%**	**99%**
					Persentase Peran serta Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Ekonomi dan Sosial melalui Pelatihan dan Sosialisasi (%)	**0.59**	**%**	**0.59**	**%**	100%
				Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Laporan)	1	Dokumen	1	Dokumen	100%
					Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan	43	Orang	43	Orang	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Perencanaan Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target 2025		Realisasi		Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7		8		9
					Pendampingan Penyelenggaraan PUG					
					Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	43	Orang	43	Orang	100%
				Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Dokumen	4	Dokumen	100%
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	65	Lembaga	30	Lembaga	46%
					Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	1725	Orang	1,725	Orang	100%
				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	**Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatakan Layanan Komprehensif (%)**	**70.00**	**%**	**4.53**	**%**	**6%**
				Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Dokumen	6	Dokumen	120%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Perencanaan Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target 2025		Realisasi		Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7		8		9
				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	370	Orang	84	Orang	23%
					Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	41	Layanan	56	Layanan	137%
				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	**Persentase Lembaga yang Aktif dalam Peningkatan Kualitas Keluarga (%)**	**100**	**%**	**100.00**	**%**	**100%**
				Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	Dokumen	1	Dokumen	100%
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50	Orang	100	Orang	200%
				Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	110	Layanan	142	Layanan	129%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Perencanaan Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target 2025		Realisasi		Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7		8		9
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	**Persentase Pemanfaatan Data Gender dan Anak oleh PD (%)**	**100**	**%**	**100.00**	**%**	**100%**
				Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	52	Dokumen	52	Dokumen	100%
	Meningkatnya Kapasitas dan Kolaborasi antar Lembaga Perlindungan Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	Renstra Tahun 2025-2029	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)**	**65.6**	**Nilai**	**70.03**	**Nilai**	**107%**
				Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	1	Organisasi	2	Organisasi	200%
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3	Dokumen	4	Dokumen	133%
		Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	Renstra Tahun 2025-2029	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)**	**85.4**	**Nilai**	**86.50**	**Nilai**	**101%**
				Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KT	150	Orang	151	Orang	101%
					Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi	2	Dokumen	3	Dokumen	150%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Perencanaan Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target 2025	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota			
				Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	50 Orang	58 Orang	116%
					Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	37 Orang	26 Orang	70%
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMP	80 Orang	79 Orang	99%

Berdasarkan Tabel 3.1.7 pada sesuai Renstra Tahun 2024-2026 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Mengampu 2 Urusan yaitu Urusan Sosial dan Urusan PPPA. Pada Urusan Sosial terdapat 6 Program dan 15 kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator “Nilai SAKIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak” pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 78 Nilai dengan realisasi 78,20 Nilai dan capaian sebesar 100% masuk kategori capaian kinerja “Sangat Tinggi” yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan. Pencapaian Program tersebut didukung oleh 7 kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan realisasi Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sebanyak 6 dokumen antara lain :
   a. Dokumen LKjIP Tahun 2024
   b. Dokumen LPPD Tahun 2024
   c. Dokumen LKPJ Perangkat Daerah Tahun 2024
   d. Dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025
   e. Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025
   f. Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Tribulan IV

   Kegiatan tersebut masuk dalam kategori capaian kinerja “Sangat Tinggi” dengan capaian 128% yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan keluaran Jumlah Persentase Dokumen atau Laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun masuk dalam kategori capaian kinerja “Sangat Tinggi” dengan capaian 107% yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan.
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan keluaran Jumlah Persentase Dokumen atau Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun masuk dalam kategori capaian kinerja “Sangat Tinggi” dengan capaian 128% yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan keluaran Jumlah Persentase Paket atau Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun masuk dalam kategori capaian kinerja “Sangat Tinggi” dengan capaian 235% yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan keluaran Jumlah Persentase Barang Milik Daerah SKPD yang Diadakan masuk dalam kategori capaian kinerja “Sangat Tinggi” dengan capaian 128% yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan.
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan keluaran Jumlah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia masuk dalam kategori capaian kinerja “Sangat Tinggi” dengan capaian 143% yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan.
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan keluaran Jumlah Persentase Barang Milik Daerah SKPD yang Terawat masuk dalam kategori capaian kinerja “Tidak Tercapai” dengan capaian 71% hal ini dikarenakan keadaan isidental sehingga target yang ditentukan belum dapat tercapai.

Program Pemberdayaan Sosial dengan indikator “Persentase PSKS yang mendapat pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial” pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 85% dengan realisasi 100% dan capaian sebesar 118% masuk kategori capaian kinerja “Rendah” yang artinya gagal mencapai kinerja dari target yang ditentukan. Hal ini disebabkan pada program tersebut terdapat 1 kegiatan yang tidak dapat mencapai target. Pencapaian Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan.

1. Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah Rekomendasi Izin Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota masuk dalam kategori capaian kinerja “Sangat Rendah” dengan capaian 0% yang artinya gagal mencapai kinerja dari target yang ditentukan. Hal ini dikarenakan output dari pelaksanaan sosialisasi PUB dan UGB tidak adanya permintaan rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinas Sosial PPPA.
2. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah Orang yang Mendapatkan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota masuk dalam kategori capaian kinerja “Sangat Tinggi” dengan capaian 104% yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan.

Program Rehabilitasi Sosial dengan indikator “Persentase Rehabilitasi Sosial bagi PPKS/ PMKS” pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 85% dengan realisasi 100% dan capaian sebesar 100% masuk kategori capaian kinerja “Sangat Tinggi”

yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan. Pencapaian Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dengan keluaran Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, dan Gepeng yang Mendapatkan Layanan Sosial di Luar Panti masuk dalam kategori capaian kinerja “Sangat Tinggi” dengan capaian 118% yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan.
2. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial dengan keluaran Jumlah PPKS/ PMKS yang Mendapatkan Layanan Sosial Dasar di Luar Panti masuk dalam kategori capaian kinerja “Sangat Tinggi” dengan capaian 118% yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan.

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan indikator “Persentase PPKS/ PMKS Penerima Program Perlindungan dan Jaminan Sosial” pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 85% dengan realisasi 96,40% dan capaian sebesar 113% masuk kategori capaian kinerja “Sangat Tinggi” yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan. Pencapaian Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan

1. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan Keluaran Jumlah Data Fakir Miskin yang Telah di Verval masuk dalam kategori capaian kinerja “ Sangat Tinggi” dengan capaian 113% yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan

Program Penanganan Bencana dengan indikator “Persentase PPKS/ PMKS Korban Bencana yang Ditangani” pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 85% dengan realisasi 93,94% dan capaian sebesar 111% masuk kategori capaian kinerja “Sangat Tinggi” yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan. Pencapaian Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah Orang yang Mendapatkan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial masuk dalam kategori capaian kinerja “Sangat Tinggi” dengan capaian 105% yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah Kampung yang Mendapatkan Pemberdayaan Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota masuk dalam kategori capaian kinerja “Sangat Tinggi” dengan capaian 145% yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan.

Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan indikator “Persentase Pengelolaan TMP” pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 85% dengan realisasi 100% dan capaian sebesar 118% masuk kategori capaian kinerja “Sangat Tinggi” yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan. Program tersebut dihitung berdasarkan TMP yang terpelihara dalam periode triwulan. Pencapaian Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah Kegiatan Pemeliharaan TMP masuk dalam kategori capaian kinerja “Sangat Tinggi” dengan capaian 118% yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan.

Pada Urusan PPPA terdapat 6 Program dan 13 kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan indikator “Persentase Program Responsif Gender pada Lembaga Pemerintah” pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi 100% dan capaian sebesar 100% masuk kategori capaian kinerja “Sangat Tinggi” yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan. Pencapaian Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah PD yang Mendapatkan Pembinaan Pelembagaan PUG masuk dalam kategori capaian kinerja “Sangat Tinggi” dengan capaian 100% yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan.
2. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota masuk dalam kategori capaian kinerja “Sangat

Tinggi” dengan capaian 100% yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan.

3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Mendapatkan Penguatan dan Pengembangan masuk dalam kategori capaian kinerja “Sangat Tinggi” dengan capaian 98% yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan.

Program Perlindungan Perempuan dengan indikator “Persentase Layanan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Diskriminasi terhadap Perempuan” pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi 100% dan capaian sebesar 100% masuk kategori capaian kinerja “Sangat Tinggi” yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan. Pencapaian Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah Layanan Rujukan yang Ditangani masuk dalam kategori capaian kinerja “Sangat Tinggi” dengan capaian 120% yang artinya gagal mencapai kinerja dari target yang ditentukan.
2. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah Layanan Rujukan yang Ditangani masuk dalam kategori capaian kinerja “Sangat Rendah” dengan capaian 14% yang artinya gagal mencapai kinerja dari target yang ditentukan. Hal ini disebabkan keadaan isidental terkait jumlah kasus yang ditangani berdasarkan data yang terlaporkan.

Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan indikator “Persentase Lembaga/ Keluarga yang Mendapat Layanan Responsif Gender” pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi 100% dan capaian sebesar 100% masuk kategori capaian kinerja “Sangat Tinggi” yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan. Pencapaian Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah Lembaga yang Mendapatkan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota masuk

dalam kategori capaian kinerja “Sangat Tinggi” dengan capaian 100% yang artinya gagal mencapai kinerja dari target yang ditentukan.

2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Mendapatkan Penguatan dan Pengembangan masuk dalam kategori capaian kinerja “Sangat Tinggi” dengan capaian 200% yang artinya gagal mencapai kinerja dari target yang ditentukan.
3. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan KG dan Hak Anak masuk dalam kategori capaian kinerja “Sangat Tinggi” dengan capaian 129% yang artinya gagal mencapai kinerja dari target yang ditentukan.

Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi 100% dan capaian sebesar 100% masuk kategori capaian kinerja “Sangat Tinggi” yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan. Pencapaian Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan

1. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah Perangkat Daerah yang Menghimpun Data Gender serta Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak masuk dalam kategori capaian kinerja “Sangat Tinggi” dengan capaian 100% yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan.

Program Pengarusutamaan Hak Anak (PHA) dengan indikator “Persentase Kecamatan yang Mendapatkan Predikat Kecamatan Layak Anak” pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi 55% dan capaian sebesar 55% masuk kategori capaian kinerja “Sangat Rendah” yang artinya gagal mencapai kinerja dari target yang ditentukan. Hal tersebut disebabkan belum semua kecamatan memiliki sk gugus tugas layak anak, sehingga prosentase dari 20 kecamatan hanya 11 kecamatan yang memimiliki. Pencapaian Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah Kegiatan

Kelembagaan PHA masuk dalam kategori capaian kinerja “Sangat Tinggi” dengan capaian 150% yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan.

Program Perlindungan Khusus Anak dengan indikator “Persentase Layanan terhadap Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus” pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi 100% dan capaian sebesar 100% masuk kategori capaian kinerja “Sangat Tinggi” yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan. Pencapaian Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak yang Ditangani masuk dalam kategori capaian kinerja “Sangat Tinggi” dengan capaian 200% yang artinya gagal mencapai kinerja dari target yang ditentukan.
2. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah Anak Korban Kekerasan yang Mendapatakan Pelayanan Perlindungan Khusus Anak masuk dalam kategori capaian kinerja “Sangat Tinggi” dengan capaian 97% yang artinya gagal mencapai kinerja dari target yang ditentukan.
3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah Laporan Hasil Kegiatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota masuk dalam kategori capaian kinerja “Tercapai” dengan capaian 99% yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan.

Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Mengampu 2 Urusan yaitu Urusan Sosial dan Urusan PPPA. Pada Urusan Sosial terdapat 6 Program dan 15 kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator “Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 78 Nilai dengan realisasi 78,20 Nilai dan capaian sebesar 100% masuk kategori capaian kinerja “Tercapai” yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan. Pencapaian Program tersebut didukung oleh 7 kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan realisasi Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100% dan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100% yang disusun sebanyak 6 dokumen antara lain :

a. Dokumen LKjIP Tahun 2024
b. Dokumen LPPD Tahun 2024
c. Dokumen LKPJ Perangkat Daerah Tahun 2024
d. Dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025
e. Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025
f. Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Tribulan IV

Kegiatan tersebut masuk dalam kategori capaian kinerja “Tercapai”.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan keluaran Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN masuk dalam interval capaian kinerja “Tidak Tercapai” dengan capaian 79%; Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN masuk dalam interval capaian kinerja “Tercapai” dengan capaian 100%; Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD masuk dalam interval capaian kinerja “Tercapai” dengan capaian 100%; dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD masuk dalam interval capaian kinerja “Tercapai” dengan capaian 100%.
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan keluaran Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai “Tercapai” dengan capaian 100%; Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan “Tercapai” dengan capaian 100%; dan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan “Tercapai” dengan capaian 100%.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan keluaran Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan “Tercapai” dengan capaian 150%; Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan “Tercapai” dengan capaian 100%; Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan “Tercapai” dengan capaian 200%; Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan “Tercapai” dengan capaian 300%; Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

“Tercapai” dengan capaian 200%; dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD “Tercapai” dengan capaian 400%;

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan keluaran Jumlah Paket Mebel yang Disediakan “Tercapai” dengan capaian 100%; dan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan “Tercapai” dengan capaian 200%.
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan keluaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat “Tercapai” dengan capaian 150%; Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan “Tercapai” dengan capaian 133%; dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan “Tercapai” dengan capaian 100%.
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan keluaran Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya “Tercapai” dengan capaian 100%; Jumlah Mebel yang Dipelihara “Tercapai” dengan capaian 4%; Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara “Tercapai” dengan capaian 100%; dan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi “Tercapai” dengan capaian 100%

Program Pemberdayaan Sosial dengan indikator “Persentase TKSK yang Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial” pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi 100% dan capaian sebesar 100% masuk kategori capaian kinerja “Tercapai” yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan. Pencapaian Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan.

1. Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang “Tidak Tercapai” dengan capaian 0%. Hal ini dikarenakan output dari pelaksanaan sosialisasi PUB dan UGB tidak adanya permintaan rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinas Sosial PPPA.
2. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota “Tercapai”

dengan capaian 80%; Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota “Tercapai” dengan capaian 100%; dan Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota “Tercapai” dengan capaian 100%

Program Rehabilitasi Sosial dengan 5 indikator yaitu:

- Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 65% dengan realisasi 100% dan capaian sebesar 154% masuk kategori capaian kinerja “Tercapai”, yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan.
- Persentase PPKS di luar SPM kecuali HIV/ AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 65% dengan realisasi 100% dan capaian sebesar 154% masuk kategori capaian kinerja “Tercapai”, yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan.
- Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 65% dengan realisasi 100% dan capaian sebesar 154% masuk kategori capaian kinerja “Tercapai”, yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan.
- Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 65% dengan realisasi 100% dan capaian sebesar 154% masuk kategori capaian kinerja “Tercapai”, yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan.
- Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 65% dengan realisasi 100% dan capaian sebesar 154% masuk kategori capaian kinerja “Tercapai”, yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan.

Pencapaian Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dengan keluaran Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota “Tercapai” dengan capaian 158%; dan Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan

Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota “Tidak Tercapai” dengan capaian 76%. Hal ini dikarenakan penerima bantuan sosial penyandang disabilitas meninggal dan pindah domisili.

2. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial dengan keluaran Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota “Tercapai” dengan capaian 110%; Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota “Tercapai” dengan capaian 94%; dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota “Tidak Tercapai” dengan capaian 4%, Hal ini disebabkan adanya verifikasi lapangan.

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan indikator “Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya” pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 85% dengan realisasi 96,40% dan capaian sebesar 113% masuk kategori capaian kinerja “Sangat Tinggi” yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan. Pencapaian Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan

1. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan Keluaran Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata “Tercapai” dengan capaian 100%; Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan “Tercapai” dengan capaian 100%; dan Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota “Tidak Tercapai” dengan capaian 34%.

Program Penanganan Bencana dengan indikator “Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial” pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 85% dengan realisasi 93,94% dan capaian sebesar 111% masuk kategori capaian kinerja “Sangat Tinggi” yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan. Pencapaian Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam

Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota “Tidak Tercapai dengan catatan” dengan capaian 89%.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota “Tercapai” dengan capaian 333%.

Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan indikator “Persentase TMP yang terkelola dengan baik” pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 85% dengan realisasi 100% dan capaian sebesar 118% masuk kategori capaian kinerja “Sangat Tinggi” yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan. Program tersebut dihitung berdasarkan TMP yang terpelihara dalam periode triwulan. Pencapaian Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan “Tercapai” dengan capaian 100%.

Pada Urusan PPPA terdapat 6 Program dan 13 kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan 2 indikator yaitu:

- Persentase ARG pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 28,5% dengan realisasi 28,31 dan capaian sebesar 99% masuk kategori capaian kinerja “Tercapai” yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan.
- Persentase Peran serta Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Ekonomi dan Sosial melalui Pelatihan dan Sosialisasi ditargetkan sebesar 0,59% dengan realisasi 0,59% dan capaian sebesar 100% masuk kategori capaian kinerja “Tercapai” yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan.

Pencapaian Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG “Tercapai” dengan capaian 100%; Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG “Tercapai” dengan capaian 100% dan Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota “Tercapai” dengan capaian 100%

2. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota “Tercapai” dengan capaian 100%.
3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan “ Tercapai” dengan capaian 46% dan Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas “Tercapai” dengan capaian 100%.

Program Perlindungan Perempuan dengan indikator “Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatakan Layanan Komprehensif” pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 70% dengan realisasi 4,53% dan capaian sebesar 6% masuk kategori capaian kinerja “Tidak Tercapai”. Hal ini disebabkan karena keadaan isidental terkait laporan kasus yang terlaporkan dengan perbandingan jumlah penduduk kabupaten nganjuk. Pencapaian Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota “Tercapai” dengan capaian 120%.
2. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan “Tidak Tercapai” dengan capaian 23%, hal ini disebabkan keadaan isidental sesuai dengan laporan kasus yang diterima dan Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota “Tercapai” dengan capaian 137%.

Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan indikator “Persentase Lembaga yang Aktif dalam Peningkatan Kualitas Keluarga” pada tahun 2025

ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi 100% dan capaian sebesar 100% masuk kategori capaian kinerja “Tercapai” yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan. Pencapaian Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia “Tercapai” dengan capaian 100%.
2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota “Tercapai” dengan capaian 200%.
3. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia “Tercapai” dengan capaian 129%.

Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak pada tahun 2025 dengan indicator “Persentase Pemanfaatan Data Gender dan Anak oleh PD” ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi 100% dan capaian sebesar 100% masuk kategori capaian kinerja “Tercapai” yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan. Pencapaian Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan

1. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia “Tercapai” dengan capaian 100%.

Program Pengarusutamaan Hak Anak (PHA) dengan indikator “Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)” pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 65,6 Nilai dengan realisasi 70,03 Nilai dan capaian sebesar 107% masuk kategori capaian kinerja “Tercapai” yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan. Pencapaian Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha “Tercapai” dengan capaian 200% dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota “Tercapai” dengan capaian 133%.

Program Perlindungan Khusus Anak dengan indikator “Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)” pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 85,4 Nilai dengan realisasi 86,50 Nilai dan capaian sebesar 101% masuk kategori capaian kinerja “Tercapai” yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan. Pencapaian Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KT “Tercapai” dengan capaian 101%.dan Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota “Tercapai” dengan capaian 150%.
2. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan “Tercapai” dengan capaian 116% dan Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan “Tidak Tercapai” dengan capaian 70%, hal ini disebabkan keadaan isidental.
3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMP “Tercapai” dengan capaian 99%.

3.2 Realisasi Anggaran

Upaya pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinsos PPPA Kabupaten Nganjuk dengan program-program dan realisasi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.2

Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6
	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**22,421,889,709.00**	**19,282,000,662.00**	**3,139,889,047.00**	**86.00**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	**22,421,889,709.00**	**19,282,000,662.00**	**3,139,889,047.00**	**86.00**
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6,164,263,559.00**	**5,619,004,303.00**	**545,259,256.00**	**91.15**
I	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**54,762,000.00**	**48,274,000.00**	**6,488,000.00**	**88.15**
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28,962,000.00	28,926,000.00	36,000.00	99.88
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25,800,000.00	19,348,000.00	6,452,000.00	74.99
II	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3,940,040,000.00**	**3,482,920,939.00**	**457,119,061.00**	**88.40**
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,775,567,000.00	3,320,198,195.00	455,368,805.00	87.94
3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	151,359,000.00	151,272,744.00	86,256.00	99.94
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5,440,000.00	4,270,000.00	1,170,000.00	78.49
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7,674,000.00	7,180,000.00	494,000.00	93.56
III	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**30,100,000.00**	**24,475,000.00**	**5,625,000.00**	**81.31**
1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10,450,000.00	9,500,000.00	950,000.00	90.91
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	18,650,000.00	13,975,000.00	4,675,000.00	74.93
IV	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**304,945,660.00**	**296,625,966.00**	**8,319,694.00**	**97.27**
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	85,137,810.00	84,820,500.00	317,310.00	99.63
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100,615,750.00	100,593,065.00	22,685.00	99.98
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35,118,650.00	29,561,350.00	5,557,300.00	84.18
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4,250,000.00	2,400,000.00	1,850,000.00	56.47
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	43,110,200.00	42,588,301.00	521,899.00	98.79
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36,713,250.00	36,662,750.00	50,500.00	99.86
V	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**317,042,199.00**	**312,208,550.00**	**4,833,649.00**	**98.48**
1	Pengadaan Mebel	99,449,400.00	98,010,000.00	1,439,400.00	98.55
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	217,592,799.00	214,198,550.00	3,394,249.00	98.44
VI	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**769,402,950.00**	**739,812,055.00**	**29,590,895.00**	**96.15**
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,500,000.00	2,500,000.00	-	100.00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	162,000,000.00	137,963,151.00	24,036,849.00	85.16
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	604,902,950.00	599,348,904.00	5,554,046.00	99.08
VII	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan\ Pemerintahan Daerah**	**747,970,750.00**	**714,687,793.00**	**33,282,957.00**	**95.55**
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	259,989,550.00	227,121,229.00	32,868,321.00	87.36

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
2	Pemeliharaan Mebel	12,400,000.00	12,191,130.00	208,870.00	98.32
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12,600,000.00	12,540,700.00	59,300.00	99.53
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	462,981,200.00	462,834,734.00	146,466.00	99.97
B	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**340,144,100.00**	**319,703,500.00**	**20,440,600.00**	**93.99**
I	**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**8,948,600.00**	**8,644,600.00**	**304,000.00**	**96.60**
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	8,948,600.00	8,644,600.00	304,000.00	96.60
II	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**331,195,500.00**	**311,058,900.00**	**20,136,600.00**	**93.92**
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	8,739,800.00	8,623,800.00	116,000.00	98.67
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	314,205,900.00	294,201,300.00	20,004,600.00	93.63
3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	8,249,800.00	8,233,800.00	16,000.00	99.81
C	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**1,838,957,450.00**	**1,371,643,905.00**	**467,313,545.00**	**74.59**
I	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**555,199,800.00**	**516,575,286.00**	**38,624,514.00**	**93.04**
1	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	29,988,800.00	16,330,000.00	13,658,800.00	54.45
2	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	525,211,000.00	500,245,286.00	24,965,714.00	95.25
II	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**1,283,757,650.00**	**855,068,619.00**	**428,689,031.00**	**66.61**
1	Penyediaan Permakanan	261,660,850.00	257,531,876.00	4,128,974.00	98.42
2	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	254,226,800.00	164,790,243.00	89,436,557.00	64.82
3	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	767,870,000.00	432,746,500.00	335,123,500.00	56.36
D	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**13,632,086,700.00**	**11,547,106,704.00**	**2,084,979,996.00**	**84.71**
I	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**13,632,086,700.00**	**11,547,106,704.00**	**2,084,979,996.00**	**84.71**
1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	6,746,900.00	5,252,000.00	1,494,900.00	77.84
2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	168,474,200.00	154,138,503.00	14,335,697.00	91.49
3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	13,456,865,600.00	11,387,716,201.00	2,069,149,399.00	84.62
E	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**363,200,050.00**	**343,567,250.00**	**19,632,800.00**	**94.59**
I	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**67,032,600.00**	**60,654,750.00**	**6,377,850.00**	**90.49**
1	Penyediaan Makanan	67,032,600.00	60,654,750.00	6,377,850.00	90.49
II	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**296,167,450.00**	**282,912,500.00**	**13,254,950.00**	**95.52**

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6
1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	296,167,450.00	282,912,500.00	13,254,950.00	95.52
G	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**83,237,850.00**	**80,975,000.00**	**2,262,850.00**	**97.28**
I	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**83,237,850.00**	**80,975,000.00**	**2,262,850.00**	**97.28**
1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	83,237,850.00	80,975,000.00	2,262,850.00	97.28
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**1,311,274,220.00**	**1,036,905,383.00**	**274,368,837.00**	**79.08**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	**1,311,274,220.00**	**1,036,905,383.00**	**274,368,837.00**	**79.08**
A	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**256,196,300.00**	**246,715,107.00**	**9,481,193.00**	**96.30**
I	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**25,283,800.00**	**22,441,207.00**	**2,842,593.00**	**88.76**
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	6,822,000.00	4,105,000.00	2,717,000.00	60.17
2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	15,856,000.00	15,782,407.00	73,593.00	99.54
3	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	2,605,800.00	2,553,800.00	52,000.00	98.00
II	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**11,500,000.00**	**11,262,300.00**	**237,700.00**	**97.93**
1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	11,500,000.00	11,262,300.00	237,700.00	97.93
III	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**219,412,500.00**	**213,011,600.00**	**6,400,900.00**	**97.08**
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	5,450,000.00	5,429,000.00	21,000.00	99.61
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	213,962,500.00	207,582,600.00	6,379,900.00	97.02
B	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**317,453,700.00**	**232,287,737.00**	**85,165,963.00**	**73.17**
I	**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota**	**94,410,000.00**	**81,237,988.00**	**13,172,012.00**	**86.05**
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	94,410,000.00	81,237,988.00	13,172,012.00	86.05
II	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**223,043,700.00**	**151,049,749.00**	**71,993,951.00**	**67.72**
1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	65,000,000.00	65,000,000.00	-	100.00
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	158,043,700.00	86,049,749.00	71,993,951.00	54.45

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6
III	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	
1	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	
C	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**164,779,700.00**	**157,976,328.00**	**6,803,372.00**	**95.87**
I	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**49,819,600.00**	**47,685,831.00**	**2,133,769.00**	**95.72**
1	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	49,819,600.00	47,685,831.00	2,133,769.00	95.72
II	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**42,879,600.00**	**38,875,100.00**	**4,004,500.00**	**90.66**
1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	42,879,600.00	38,875,100.00	4,004,500.00	90.66
III	**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**72,080,500.00**	**71,415,397.00**	**665,103.00**	**99.08**
1	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	72,080,500.00	71,415,397.00	665,103.00	99.08
D	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**5,826,500.00**	**3,375,500.00**	**2,451,000.00**	**57.93**
I	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**5,826,500.00**	**3,375,500.00**	**2,451,000.00**	**57.93**
1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	5,826,500.00	3,375,500.00	2,451,000.00	57.93
E	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**195,608,800.00**	**176,894,298.00**	**18,714,502.00**	**90.43**
I	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**195,608,800.00**	**176,894,298.00**	**18,714,502.00**	**90.43**
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	19,116,750.00	12,001,000.00	7,115,750.00	62.78
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	176,492,050.00	164,893,298.00	11,598,752.00	93.43
II	**Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-
F	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**371,409,220.00**	**219,656,413.00**	**151,752,807.00**	**59.14**

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6
I	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**124,708,600.00**	**120,037,863.00**	**4,670,737.00**	**96.25**
1	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KT	47,400,000.00	43,782,863.00	3,617,137.00	92.37
2	Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	77,308,600.00	76,255,000.00	1,053,600.00	98.64
II	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**177,680,620.00**	**38,793,050.00**	**138,887,570.00**	**21.83**
1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	42,164,620.00	31,389,050.00	10,775,570.00	74.44
2	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	135,516,000.00	7,404,000.00	128,112,000.00	5.46
III	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**69,020,000.00**	**60,825,500.00**	**8,194,500.00**	**88.13**
1	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ Kota	69,020,000.00	60,825,500.00	8,194,500.00	88.13
JUMLAH		**23,733,163,929.00**	**20,318,906,045.00**	**3,414,257,884.00**	**85.61**

Tabel diatas menunjukkan program dan kegiatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2025 dianggarkan sebesar **Rp23.733.163.929.00** dan terealisasi sebesar **Rp20.318.906.045.00** dengan sisa sebesar **Rp 3.414.257.884.00**atau **85,61%**.

Sisa tersebut dikarenakan ada beberapa hambatan, yaitu:

a. Adanya efesiensi anggaran
b. Tidak tersalurkannya Bantuan Sosial LKSA
c. Adanya Proses Verval bagi Penerima Bantuan Sosial bagi Penyandang Disabilitas, Lansia Miskin dan Siswa Miskin sehingga SK yang ditetapkan lebih sedikit daripada yang sudah terinput dalam anggaran
d. Ada beberapa penerima bantuan social yang pindah domisili dan meninggal sehingga bantuan social tidak dapat tersalurkan 100%
e. Penerima Bantuan DBHCHT tidak tersalur semua dikarenakan adanya proses verval data

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk kepada Bupati Nganjuk, antara lain:

1. Tahun 2025 Indikator Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dan Renstra Tahun 2024-2026 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk. Selain itu juga mengacu pada RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 dan Renstra Tahun 2025-2029 Dinas Sosial pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk.
2. Pada Renstra Renstra Tahun 2024-2026 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk terdapat salah satu indicator sasaran yang tidak dapat tercapai dikarenakan pada penilaian KLA yang pada saat perencanaan masih dilaksanakan setiap 1 tahun sekali, tetapi pada berjalannya waktu terdapat perubahan penilaian KLA yang dilaksanakan 2 Tahun sekali dan padaa saat penyusunan laporan nilai KLA belum dirilis.
3. Pada Renstra Renstra Tahun 2025-2029 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk terdapat salah satu indicator tujuan dan sasaran yang belum menyajikan nilai indeks tahun 2025 dikarenakan pada saat penyusunan laporan nilai indeks belum dirilis.
4. Anggaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk sebesar Rp23.733.163.929.00 dan terealisasi sebesar Rp20.318.906.045.00 dengan sisa sebesar Rp 3.414.257.884.00 atau 85,61%.

a. Permasalahan:

1. Database PPKS masih dalam proses perbaikan penyusunan data sesuai 26 jenis PPKS.
2. Pemberian bantuan kepada PMKS/ PPKS masih seputar bantuan untuk kebutuhan dasar ataupun rehabilitasi, hal ini belum bisa menyentuh substansi dari pengentasan permasalahan/kemiskinan hingga tuntas.

b. Solusi:

1. Perlu melakukan pendataan PMKS/PPKS untuk memperoleh data PMKS/PPKS yang valid
2. Perlu dilakukan monitoring dan pendataan yang lebih rinci terhadap efektivitas program/kegiatan yang dilakukan untuk penanganan PMKS/ PPKS untuk dicari kendala dan masalahnya sebagai bahan evaluasi untuk kebijakan yang akan datang.
3. Pemberian bantuan diharapkan dapat berupa sebuah bantuan kontinuitas untuk PMKS/ PPKS yang tidak mempunyai potensi. Sedangkan yang mempunyai potensi bisa berupa pemberian keterampilan, bimbingan dan modal untuk usaha, ataupun pembukaan lapangan kerja yang bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk ini dibuat untuk dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang pengawasan.

Nganjuk, 4 Februari 2026
Kepala Dinas Sosial PPPA
Kabupaten Nganjuk



HARIS JATMIKO, S.Pd.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19711219 199803 1 006

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Drs. DARMANTONO
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : SRI HANDOKO TARUNA, S.STP., M.Si
Jabatan : Pj. Bupati Nganjuk

Selaku atasan Pihak Pertama,selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk, Januari 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Pj. Bupati Nganjuk	Kepala Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk
SRI HANDOKO TARUNA, S.STP., M.Si	**Drs. DARMANTONO**
	Pembina Tingkat I
	NIP. 19680421 199403 1 010

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Ketercukupan Kebutuhan Dasar PPKS	Persentase PPKS yang Tercukupi Kebutuhan Dasarnya	87%
2	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	72,60
3	Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak	64,00

No.	Program	Anggaran		Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	5,742,741,247.00	DAU - APBD
2	Pemberdayaan Sosial	Rp.	414,630,850.00	DAU - APBD
3	Rehabilitasi Sosial	Rp.	2,073,790,250.00	DAU - APBD
4	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp.	6,699,918,800.00	DAU - APBD
5	Penanganan Bencana	Rp.	441,085,900.00	DAU - APBD
6	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp.	71,369,150.00	DAU - APBD
7	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp.	406,415,500.00	DAU - APBD
8	Perlindungan Perempuan	Rp.	208,050,700.00	DAU - APBD
9	Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp.	164,973,200.00	DAU - APBD
10	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp.	14,504,000.00	DAU - APBD
11	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp.	355,000,000.00	DAU - APBD
12	Perlindungan Khusus Anak	Rp.	145,844,800.00	DAU - APBD
Jumlah Total		Rp.	**16,738,324,397.00**	

Nganjuk, Januari 2025

PIHAK KEDUA
Pj. Bupati Nganjuk

SRI HANDOKO TARUNA, S.STP., M.Si

PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Sosial PPPA
Kabupaten Nganjuk

DRS. DARMANTONO
Pembina Tingkat I
NIP. 19680421 199403 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Drs. DARMANTONO
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : Dr. Drs. H. MARHAEN DJUMADI, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.BA
Jabatan : Bupati Nganjuk

Selaku atasan Pihak Pertama,selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk, 03 Maret 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Bupati Nganjuk	Kepala Dinas Sosial PPPA
	Kabupaten Nganjuk
Dr.Drs.H.MARHAEN DJUMADI, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.BA	**Drs. DARMANTONO**
	Pembina Tingkat I
	NIP. 19680421 199403 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Ketercukupan Kebutuhan Dasar PPKS	Persentase PPKS yang Tercukupi Kebutuhan Dasarnya	87%
2	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	72,60
3	Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak	64,00

No.	Program	Anggaran		Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp	5.403.116.347,00	DAU - APBD
2	Pemberdayaan Sosial	Rp	340.144.100,00	DAU - APBD
3	Rehabilitasi Sosial	Rp	1.905.709.400,00	DAU - APBD
4	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp	12.709.075.150,00	DAU - APBD
5	Penanganan Bencana	Rp	363.200.050,00	DAU - APBD
6	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp	59.387.850,00	DAU - APBD
7	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp	243.696.300,00	DAU - APBD
8	Perlindungan Perempuan	Rp	325.368.700,00	DAU - APBD
9	Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp	136.279.700,00	DAU - APBD
10	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp	5.826.500,00	DAU - APBD
11	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp	192.693.800,00	DAU - APBD
12	Perlindungan Khusus Anak	Rp	356.409.220,00	DAU - APBD
Jumlah Total		**Rp**	**22.040.907.117,00**	

Nganjuk, 03 Maret 2025

PIHAK KEDUA
Bupati Nganjuk

Dr.Drs.H.MARHAEN DJUMADI, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.BA

PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Sosial PPPA
Kabupaten Nganjuk

DR. SARMANTONO
Pembina Tingkat I
NIP. 19680421 199403 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : HARIS JATMIKO, S.Pd.,M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : Dr. Drs. H. MARHAEN DJUMADI, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.BA
Jabatan : Bupati Nganjuk

Selaku atasan Pihak Pertama,selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk, 01 Agustus 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Bupati Nganjuk	Kepala Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk
Dr.Drs.H.MARHAEN DJUMADI, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.BA	**HARIS JATMIKO, S.Pd.,M.Si**
	Pembina Utama Muda
	NIP. 19711219 199803 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Ketercukupan Kebutuhan Dasar PPKS	Persentase PPKS yang Tercukupi Kebutuhan Dasarnya	87%
2	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	72,60
3	Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak	64,00

No.	Program	Anggaran		Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp	5.403.116.347,00	DAU - APBD
2	Pemberdayaan Sosial	Rp	340.144.100,00	DAU - APBD
3	Rehabilitasi Sosial	Rp	1.905.709.400,00	DAU - APBD
4	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp	12.709.075.150,00	DAU - APBD
5	Penanganan Bencana	Rp	363.200.050,00	DAU - APBD
6	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp	59.387.850,00	DAU - APBD
7	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp	243.696.300,00	DAU - APBD
8	Perlindungan Perempuan	Rp	325.368.700,00	DAU - APBD
9	Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp	136.279.700,00	DAU - APBD
10	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp	5.826.500,00	DAU - APBD
11	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp	192.693.800,00	DAU - APBD
12	Perlindungan Khusus Anak	Rp	356.409.220,00	DAU - APBD
Jumlah Total		**Rp**	**22.040.907.117,00**	

Nganjuk, 01 Agustus 2025

PIHAK KEDUA
Bupati Nganjuk

Dr.Drs.H.MARHAEN DJUMADI, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.BA

PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Sosial PPPA
Kabupaten Nganjuk

HARIS JATMIKO, S.Pd.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19711219 199803 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : HARIS JATMIKO, S.Pd.,M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : Dr. Drs. H. MARHAEN DJUMADI, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.BA

Jabatan : Bupati Nganjuk

Selaku atasan Pihak Pertama,selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk, September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Bupati Nganjuk	Kepala Dinas Sosial PPPA
	Kabupaten Nganjuk
Dr.Drs.H.MARHAEN DJUMADI, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.BA	**HARIS JATMIKO, S.Pd.,M.Si**
	Pembina Utama Muda
	NIP. 19711219 199803 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Fungsi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Meningkat Kemampuan Fungsi Sosialnya (%)	49,95
2	Meningkatnya Peran PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang Aktif (%)	75,24
3	Meningkatnya Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Pemberdayaan Gender (Indeks)	72,6
4	Meningkatnya Kapasitas dan Kolaborasi antar Lembaga Perlindungan Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	65,6
		Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	85,4

No.	Program	Anggaran		Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp	6.164.263.559,00	DAU - APBD
2	Pemberdayaan Sosial	Rp	340.144.100,00	DAU - APBD
3	Rehabilitasi Sosial	Rp	1.838.957.450,00	DAU - APBD
4	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp	13.632.086.700,00	DAU - APBD
5	Penanganan Bencana	Rp	363.200.050,00	DAU - APBD
6	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp	83.237.850,00	DAU - APBD
7	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp	256.196.300,00	DAU - APBD
8	Perlindungan Perempuan	Rp	317.453.700,00	DAU - APBD
9	Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp	164.779.700,00	DAU - APBD
10	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp	5.826.500,00	DAU - APBD
11	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp	195.608.800,00	DAU - APBD
12	Perlindungan Khusus Anak	Rp	371.409.220,00	DAU - APBD
Jumlah Total		**Rp**	**23.733.163.929,00**	

Nganjuk, September 2025

PIHAK KEDUA
Bupati Nganjuk

Dr.Drs.H.MARHAEN DJUMADI, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.BA

PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Sosial PPPA
Kabupaten Nganjuk

HARIS JAUHARI, S.Pd.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19711219 199803 1 006

3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl. Supriyadi No. 07 Nganjuk Kode Pos 64412
Telp/Fax. (0358) 3550772 Email : dinsospppa@nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR :188/ /K/411.304/2024
TENTANG
PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dengan diterbitkannya Kepmendagri Nomor 900.1.15.5.-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5.-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04 Seri E);
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal, 02 Agustus 2024

an. Bupati Nganjuk
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Kabupaten Nganjuk



Dr. DARMANTONO
Pembina Tk. 1
NIP. 19680421 199403 1 010

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ /K/411.304/2024
TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NGANJUK

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk

Tugas : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Fungsi :
a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
b. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Urusan pemerintahan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
d. Pelaksanaan Administrasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
e. Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Bupati Sesuai dengan Tugas dan Fungsinya

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Ketercukupan Kebutuhan Dasar PPKS	Persentase PPKS yang Tercukupi Kebutuhan Dasarnya	$\frac{\text{Jumlah PPKS yang Tertangani}}{\text{Jumlah PPKS yang Terdata}} \times 100\%$	Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA
2	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	$IDG = \frac{I_{(par)} + I_{(DM)} + I_{(ins-dat)}}{3}$	BPS	Dinas Sosial PPPA
3	Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak	$IPHA : \frac{D1+D2+D3+D4}{4}$	Kementerian PPPA	Dinas Sosial PPPA

a.n. Bupati Nganjuk
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Kabupaten Nganjuk

Drs. DARMANTONO
Pembina Tk. 1
NIP. 19680421 199403 1 010

4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl. Supriyadi No. 07 Nganjuk Kode Pos 64412
Telp/Fax. (0358) 3550772 Email : dinsospppa@nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR :188/ 106 /K/411.304/2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor No 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029.

Mengingat :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor No 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2024 Nomor 4 seri D);
6. Peraturan Daerah kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Nganjuk, 22 September 2025

an. Bupati Nganjuk
Kepala Dinas Sosial PPPA
Kabupaten Nganjuk



HARIS JATMIKO S.Pd.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19711219 199803 1 006

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/ 106 /K/411.304/2025
TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN NGANJUK

Tugas : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Fungsi :
a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
b. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Urusan pemerintahan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
d. Pelaksanaan Administrasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
e. Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Bupati Sesuai dengan Tugas dan Fungsinya

NO	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7
I	Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)	Indeks	**Konsep:** Kerangka konseptual yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan sosial masyarakat melalui tiga dimensi utama: Kebutuhan Dasar (pangan, kesehatan, pendidikan, dll.), Peranan Sosial (partisipasi, kohesi sosial, dll.), dan Keberdayaan Ekonomi (kemampuan individu untuk berproduksi dan memiliki aset) **Definisi Operasional :** Kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya **Formulasi Perhitungan :** Hasil dari Perhitungan Kementerian Sosial	Kementerian Sosial	Dinas Sosial PPPA
II		Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	Indeks	**Konsep :** Menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki **Definisi Operasional:** Indeks yang mengukur tingkat kesetaraan gender dalam Pembangunan berdasarkan pada dimensi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi **Formulasi Perhitungan :** Hasil dari Perhitungan BPS Kabupaten Nganjuk	BPS Kabupaten Nganjuk	Dinas Sosial PPPA
III		Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)	Indeks	**Konsep:** Indikator yang menggambarkan pencapaian Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak **Definisi Operasional:**Indikator yang menggambarkan capaian pembangunan perlindungan anak berdasarkan 5 klaster hak anak yaitu, hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; dan perlindungan khusus	Kementerian PPPA	Dinas Sosial PPPA

NO	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7
				Formulasi Perhitungan : Hasil dari Perhitungan BPS Kabupaten Nganjuk		
1	Meningkatnya Fungsi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Meningkat Kemampuan Fungsi Sosialnya (%)	Persentase	**Konsep:** Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1007)	Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA
				Definisi Operasional: Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1007) Keberfungsian Sosial adalah suatu kondisi yang memungkinkan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dan hak dasarnya, melaksanakan tugas dan peranan sosialnya, serta mengatasi masalah dalam kehidupannya		
				Formulasi Perhitungan : Jumlah PPKS yang mempunyai kemampuan fungsi sosial / Jumlah PPKS Tahun N x 100%		
2	Meningkatnya Peran PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang Aktif (%)	Persentase	**Konsep:** Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau Masyarakat	Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA
				Definisi Operasional: Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan social		

NO	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7
				Formulasi Perhitungan : Jumlah PSKS yang aktif / Jumlah PSKS Tahun N x 100%		
3	Meningkatnya Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Pemberdayaan Gender (Indeks)	Indeks	**Konsep:** Angka yang digunakan untuk mengukur kesetaraan gender di bidang politik melalui keterlibatan perempuan dalam parlemen, pengambilan keputusan melalui kedudukan dan jabatan sebagai tenaga profesional, dan ekonomi melalui sumbangan pendapatan perempuan	Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA
				Definisi Operasional: IDG menunjukkan apakah wanita dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan. Metode penghitungan IDG masih mengacu pada metodologi lama sampai Indeks Ketidaksetaraan Gender (IKG) bisa dihitung		
				Formulasi Perhitungan : Hasil dari Perhitungan BPS Kabupaten Nganjuk		
4	Meningkatnya Kapasitas dan Kolaborasi antar Lembaga Perlindungan Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	Indeks	**Konsep:** Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) adalah Indikator yang menggambarkan capaian pemenuhan hak anak	Kementerian PPPA	Dinas Sosial PPPA
				Definisi Operasional: IPHA merupakan bagian dari IPA, yang tersusun dari 4 klaster hak anak, yaitu; hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan dan pemanfaatan waktu luang		
				Formulasi Perhitungan : Hasil dari Perhitungan Kementerian PPPA melalui web siga.kemenpppa.go.id		
5			Indeks	**Konsep:** Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Kementerian PPPA	Dinas Sosial PPPA

NO	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)		adalah Indikator yang menggambarkan capaian perlindungan khsusus anak **Definisi Operasional:** IPKA merupakan bagian dari IPA, yang tersusun dari 5 indikator pada klaster perlindungan khusus anak, yaitu; persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja; rasio anak berusia 5-17 tahun (disabilitas/nondisabilitas) yang pernah mengakses internet; rasio APS anak berusia 7-17 tahun (disabilitas/nondisabilitas); persentase anak berusia 0-17 tahun yang hidup di bawah garis kemiskinan; persentase anak berusia 5-17 tahun yang terlantar **Formulasi Perhitungan :** Hasil dari Perhitungan Kementerian PPPA melalui web siga.kemenpppa.go.id		

Nganjuk, 22 September 2025

an. Bupati Nganjuk
Kepala Dinas Sosial PPPA
Kabupaten Nganjuk

HARIS JATMIKO S.Pd.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19711219 199803 1 006

5. Dokumen Penganggaran (Ikhtisar DPA) Tahun 2025

KODE	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	BELANJA			HASIL / KEGIATAN				KET
				ANGGARAN	REALISASI	SISA	INDIKATOR KEGIATAN	RENCANA	REALISASI	SATUAN	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**22,421,889,709.00**	**19,282,000,662.00**	**3,139,889,047.00**		**22,421,889,709.00**	**19,282,003,920.00**		
1.06	**Urusan Pemerintah Bidang Sosial**			**22,421,889,709.00**	**19,282,000,662.00**	**3,139,889,047.00**		**22,421,889,709.00**	**19,282,003,920.00**		
1.06 . 01	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA***			**6,164,263,559.00**	**5,619,004,303.00**	**545,259,256.00**		**6,164,263,559.00**	**5,619,004,303.00**		
1.06 . 01 . 2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	**TRUE**		**54,762,000.00**	**48,274,000.00**	**6,488,000.00**		**54,762,000.00**	**48,274,000.00**		
1.06 . 01 . 2.01 . 06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	28,962,000.00	28,926,000.00	36,000.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	28,962,000.00	28,926,000.00	Rp	
							Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	Laporan	
							Hasil : Jumlah Persentase Dokumen atau Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Terpenuhi	78	100	%	
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	25,800,000.00	19,348,000.00	6,452,000.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	25,800,000.00	19,348,000.00	Rp	
							Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	Laporan	
							Hasil : Jumlah Persentase Dokumen atau Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Terpenuhi	78	100	%	
1.06 . 01 . 2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***			**3,940,040,000.00**	**3,482,920,939.00**	**457,119,061.00**		**3,940,040,000.00**	**3,482,920,939.00**		
1.06 . 01 . 2.02 . 01	*Penydiaan gaji dan Tunjangan ASN*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	3,775,567,000.00	3,320,198,195.00	455,368,805.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	3,775,567,000.00	3,320,198,195.00	Rp	
							Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24	19	orang/bulan	
							Hasil : Jumlah Persentase Dokumen atau Laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun	78	79	%	
1.06 . 01 . 2.02 . 02	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	Dana Alokasi		151,359,000.00	151,272,744.00	86,256.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	151,359,000.00	151,272,744.00	Rp	

KODE	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	BELANJA			HASIL / KEGIATAN				KET
				ANGGARAN	REALISASI	SISA	INDIKATOR KEGIATAN	RENCANA	REALISASI	SATUAN	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK				Keluaran : Terlaksananya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun	12	12	Dokumen	
							Hasil : Terwujudnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun	78	100	%	
1.06 . 01 . 2.02 . 05	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	5,440,000.00	4,270,000.00	1,170,000.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	5,440,000.00	4,270,000.00	Rp	
							Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	Laporan	
							Hasil : Jumlah Persentase Dokumen atau Laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun	78	100	%	
1.06 . 01 . 2.02 . 07	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	7,674,000.00	7,180,000.00	494,000.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	7,674,000.00	7,180,000.00	Rp	
							Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	18	Laporan	
							Hasil : Jumlah Persentase Dokumen atau Laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun	78	100	%	
1.06 . 01 . 2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***			**30,100,000.00**	**24,475,000.00**	**5,625,000.00**		**30,100,000.00**	**24,475,000.00**		
1.06.01.2.05.0005	*Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*			1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	1,000,000.00	1,000,000.00	**Rp**	
							Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	1	Dokumen	
							Hasil : Jumlah Persentase Dokumen atau Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun	78	100	%	
1.06 . 01 . 2.05 . 09	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	10,450,000.00	9,500,000.00	950,000.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	10,450,000.00	9,500,000.00	Rp	
							Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	2	Orang	
							Hasil : Jumlah Persentase Dokumen atau Laporan Administrasi Kepegawaian	78	100	%	

KODE	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	BELANJA			HASIL / KEGIATAN				KET
				ANGGARAN	REALISASI	SISA	INDIKATOR KEGIATAN	RENCANA	REALISASI	SATUAN	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Perangkat Daerah yang disusun				
1.06.01.2.05.0010	*Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	18,650,000.00	13,975,000.00	4,675,000.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	18,650,000.00	13,975,000.00		
							Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20	20	Orang	
							Hasil : Jumlah Persentase Dokumen atau Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun	78	100	%	
1.06 . 01 . 2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***			**304,945,660.00**	**296,625,966.00**	**8,319,694.00**		**304,945,660.00**	**296,625,966.00**		
1.06 . 01 . 2.06 . 01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	85,137,810.00	84,820,500.00	317,310.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	85,137,810.00	84,820,500.00	Rp	
							Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	3	Paket	
							Hasil : Jumlah Persentase Paket atau Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun	78	150	%	
1.06 . 01 . 2.06 . 04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	100,615,750.00	100,593,065.00	22,685.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	100,615,750.00	100,593,065.00	Rp	
							Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	4	Paket	
							Hasil : Jumlah Persentase Paket atau Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun	78	100	%	
1.06 . 01 . 2.06 . 05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kabupaten Nganjuk	35,118,650.00	29,561,350.00	5,557,300.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	35,118,650.00	29,561,350.00	Rp	
							Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	4	Paket	
							Hasil : Jumlah Persentase Paket atau Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun	78	200	%	
1.06 . 01 . 2.06 . 06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	4,250,000.00	2,400,000.00	1,850,000.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	4,250,000.00	2,400,000.00	Rp	
							Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	3	Dokumen	
							Hasil : Jumlah Persentase Paket atau Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun	78	300	%	
1.06 . 01 . 2.06 . 08	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	Dana Alokasi	KABUPATEN	43,110,200.00	42,588,301.00	521,899.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	43,110,200.00	42,588,301.00	Rp	
		Umum (D A U)	NGANJUK				Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2	4	Laporan	

KODE	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	BELANJA			HASIL / KEGIATAN				KET
				ANGGARAN	REALISASI	SISA	INDIKATOR KEGIATAN	RENCANA	REALISASI	SATUAN	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Hasil : Jumlah Persentase Paket atau Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun	78	200	%	
1.06 . 01 . 2.06 . 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	36,713,250.00	36,662,750.00	50,500.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	36,713,250.00	36,662,750.00	Rp	
							Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	4	Laporan	
							Hasil : Jumlah Persentase Paket atau Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun	78	400	%	
1.06 . 01 . 2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***			**317,042,199.00**	**312,208,550.00**	**4,833,649.00**		**317,042,199.00**	**312,208,550.00**	**Rp**	
1.06.01.2.07.0005	*Pengadaan Mebel*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	99,449,400.00	98,010,000.00	1,439,400.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	99,449,400.00	98,010,000.00		
							Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	1	Unit	
							Hasil : Jumlah Persentase Barang Milik Daerah SKPD yang Diadakan	78	100	%	
1.06.01.2.07.06	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	217,592,799.00	214,198,550.00	3,394,249.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	217,592,799.00	214,198,550.00	Rp	
							Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	4	Unit	
							Hasil : Jumlah Persentase Barang Milik Daerah SKPD yang Diadakan	78	200	%	
1.06 . 01 . 2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			**769,402,950.00**	**739,812,055.00**	**29,590,895.00**		**769,402,950.00**	**739,812,055.00**	**Rp**	
1.06 . 01 . 2.08 . 01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	2,500,000.00	2,500,000.00	Rp	
							Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	3	Laporan	
							Hasil : Jumlah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	78	150	%	
1.06 . 01 . 2.08 . 02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	162,000,000.00	137,963,151.00	24,036,849.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	162,000,000.00	137,963,151.00	Rp	
							Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	4	Laporan	
							Hasil : Jumlah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	78	133	%	
1.06 . 01 . 2.08 . 04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	604,902,950.00	599,348,904.00	5,554,046.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	604,902,950.00	599,348,904.00	Rp	
							Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12	12	Laporan	

KODE	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	BELANJA			HASIL / KEGIATAN				KET
				ANGGARAN	REALISASI	SISA	INDIKATOR KEGIATAN	RENCANA	REALISASI	SATUAN	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				
							Hasil : Jumlah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	78	100	%	
1.06 . 01 . 2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			**747,970,750.00**	**714,687,793.00**	**33,282,957.00**		**747,970,750.00**	**714,687,793.00**		
1.06 . 01 . 2.09 . 02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	259,989,550.00	227,121,229.00	32,868,321.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	259,989,550.00	227,121,229.00	Rp	
							Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30	30	Unit	
							Hasil : Jumlah Persentase Barang Milik Daerah SKPD yang Terawat	78	100	%	
1.06.01.2.09.05	*Pemeliharaan Mebel*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	12,400,000.00	12,191,130.00	208,870.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	12,400,000.00	12,191,130.00	Rp	
							Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara	50	2	Unit	
							Hasil : Jumlah Persentase Barang Milik Daerah SKPD yang Terawat	78	4	%	
1.06 . 01 . 2.09 . 06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	12,600,000.00	12,540,700.00	59,300.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	12,600,000.00	12,540,700.00	Rp	
							Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	25	Unit	
							Hasil : Jumlah Persentase Barang Milik Daerah SKPD yang Terawat	78	100	%	
1.06 . 01 . 2.09 . 09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	462,981,200.00	462,834,734.00	146,466.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	462,981,200.00	462,834,734.00	Rp	
							Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	3	Unit	
							Hasil : Jumlah Persentase Barang Milik Daerah SKPD yang Terawat	78	100	%	
1.06 . 02	***Program Pemberdayaan Sosial***			**340,144,100.00**	**319,703,500.00**	**20,440,600.00**		**340,144,100.00**	**319,703,500.00**		
1.06.02.2.02.01	**Pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten/kota**			**8,948,600.00**	**8,644,600.00**	**304,000.00**		**8,948,600.00**	**8,644,600.00**		
1.06.02.2.02.01	*Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang*			8,948,600.00	8,644,600.00	304,000.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	8,948,600.00	8,644,600.00	Rp	
							Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	0	0	Dokumen	
							Hasil : Jumlah Rekomendasi Izin Pengumpulan Sumbangan	85.00	0.00	%	

KODE	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	BELANJA			HASIL / KEGIATAN				KET
				ANGGARAN	REALISASI	SISA	INDIKATOR KEGIATAN	RENCANA	REALISASI	SATUAN	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							dalam Daerah Kabupaten/ Kota				
1.06 . 02 . 2.03	***Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota***			**331,195,500.00**	**311,058,900.00**	**20,136,600.00**		**331,195,500.00**	**311,058,900.00**		
1.06 . 02 . 2.03 . 01	*Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota*	Dana Alokasi Umum (D A U)	DINAS SOSIAL PPPA	8,739,800.00	8,623,800.00	116,000.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	8,739,800.00	8,623,800.00	Rp	
							Keluaran : Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100	80	Orang	
							Hasil : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	85.00	80.00	%	
1.06 . 02 . 2.03 . 02	*Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota*	Dana Alokasi Umum (D A U)	DINAS SOSIAL PPPA	314,205,900.00	294,201,300.00	20,004,600.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	314,205,900.00	294,201,300.00	Rp	
							Keluaran : Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20	20	Orang	
							Hasil : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	85.00	100.00	%	
1.06 . 02 . 2.03 . 04	*Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota*	Dana Alokasi Umum (D A U)	DINAS SOSIAL PPPA	8,249,800.00	8,233,800.00	16,000.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	8,249,800.00	8,233,800.00	Rp	
							Keluaran : Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	50	50	Lembaga	
							Hasil : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	85	100	%	
1.06 . 04	***Program Rehabilitasi Sosial***			**1,838,957,450.00**	**1,371,643,905.00**	**467,313,545.00**		**1,838,957,450.00**	**1,371,647,163.00**	**Rp**	
1.06 . 04 . 2.01	***Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial***			**555,199,800.00**	**516,575,286.00**	**38,624,514.00**		**555,199,800.00**	**516,576,042.00**		
1.06.04.2.01.05	*Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial*			29,988,800.00	16,330,000.00	13,658,800.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	29,988,800.00	16,330,000.00	Rp	

KODE	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	BELANJA			HASIL / KEGIATAN				KET
				ANGGARAN	REALISASI	SISA	INDIKATOR KEGIATAN	RENCANA	REALISASI	SATUAN	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	125	197	Orang	
							Hasil : Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, dan Gepeng yang Mendapatkan Layanan Sosial di Luar Panti	65.00	158.00	%	
1.06 . 04 . 2.01 . 06	*Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat*	Dana Alokasi Umum (D A U)	DINAS SOSIAL PPPA	525,211,000.00	500,245,286.00	24,965,714.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	525,211,000.00	500,245,286.00	Rp	
							Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	430	325	Orang	
							Hasil : Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, dan Gepeng yang Mendapatkan Layanan Sosial di Luar Panti	65.00	76.00	%	
1.06 . 04 . 2.02	***Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial***			**1,283,757,650.00**	**855,068,619.00**	**428,689,031.00**		**1,283,757,650.00**	**855,071,121.00**		
1.06.04.2.02.03	*Penyediaan Permakanan*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	261,660,850.00	257,531,876.00	4,128,974.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	261,660,850.00	257,531,876.00		
							Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	2,000	2,195	Orang	
							Hasil : Jumlah PPKS/ PMKS yang Mendapatkan Layanan Sosial Dasar di Luar Panti	65.00	110.00	%	
1.06 . 04 . 2.02 . 07	*Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	254,226,800.00	164,790,243.00	89,436,557.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	254,226,800.00	164,790,243.00	Rp	
							Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	110	103	Orang	
							Hasil : Jumlah PPKS/ PMKS yang Mendapatkan Layanan Sosial Dasar di Luar Panti	65.00	94.00	%	
1.06.04.2.02.14	*Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	767,870,000.00	432,746,500.00	335,123,500.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	767,870,000.00	432,746,500.00	Rp	

KODE	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	BELANJA			HASIL / KEGIATAN				KET
				ANGGARAN	REALISASI	SISA	INDIKATOR KEGIATAN	RENCANA	REALISASI	SATUAN	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	23	1	Lembaga	
							Hasil : Jumlah PPKS/ PMKS yang Mendapatkan Layanan Sosial Dasar di Luar Panti	65.00	4.00	%	
1.06 . 05	***Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial***			**13,632,086,700.00**	**11,547,106,704.00**	**2,084,979,996.00**		**13,632,086,700.00**	**11,547,106,704.00**		
1.06 . 05 . 2.02	***Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota***			**13,632,086,700.00**	**11,547,106,704.00**	**2,084,979,996.00**		**13,632,086,700.00**	**11,547,106,704.00**		
1.06.05.2.02.0001	*Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota*			6,746,900.00	5,252,000.00	1,494,900.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	6,746,900.00	5,252,000.00	Rp	
							Keluaran : Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	1,654.00	1,654.00	Keluarga	
							Hasil : Jumlah Data Fakir Miskin yang Telah di Verval	70.00	100.00	%	
1.06 . 05 . 2.02.02	*Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	168,474,200.00	154,138,503.00	14,335,697.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	168,474,200.00	154,138,503.00	Rp	
							Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	198839	198839	Keluarga	
							Hasil : Jumlah Data Fakir Miskin yang Telah di Verval	70.00	100	%	
1.06.05.2.02.03	*Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan KeluargaÂ*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	13,456,865,600.00	11,387,716,201.00	2,069,149,399.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	13,456,865,600.00	11,387,716,201.00	Rp	
							Keluaran : Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	8985	3093	Keluarga	
							Hasil : Jumlah Data Fakir Miskin yang Telah di Verval	70.00	34	%	
1.06 . 06	***Program Penanganan Bencana***			**363,200,050.00**	**343,567,250.00**	**19,632,800.00**		**363,200,050.00**	**343,567,250.00**		
1.06 . 06 . 2.01	***Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota***			**67,032,600.00**	**60,654,750.00**	**6,377,850.00**		**67,032,600.00**	**60,654,750.00**		
1.06 . 06 . 2.01 . 01	*Penyediaan Makanan*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	67,032,600.00	60,654,750.00	6,377,850.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	67,032,600.00	60,654,750.00	Rp	
							Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	400	358	Orang	
							Hasil : Jumlah Orang yang Mendapatkan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	70	90	%	

KODE	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	BELANJA			HASIL / KEGIATAN				KET
				ANGGARAN	REALISASI	SISA	INDIKATOR KEGIATAN	RENCANA	REALISASI	SATUAN	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.06 . 06 . 2.01	***Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota***			**296,167,450.00**	**282,912,500.00**	**13,254,950.00**		**296,167,450.00**	**282,912,500.00**		
1.06.06.2.02.0002	*Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana*			296,167,450.00	282,912,500.00	13,254,950.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	296,167,450.00	282,912,500.00	Rp	
							Keluaran : Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	18	60	Orang	
							Hasil : Jumlah Kampung yang Mendapatkan Pemberdayaan Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	70	333	%	
1.06 . 07	***Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan***			**83,237,850.00**	**80,975,000.00**	**2,262,850.00**		**83,237,850.00**	**80,975,000.00**		
1.06 . 07 . 2.01	***Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota***			**83,237,850.00**	**80,975,000.00**	**2,262,850.00**		**83,237,850.00**	**80,975,000.00**		
1.06 . 07 . 2.01 . 02	*Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	83,237,850.00	80,975,000.00	2,262,850.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	83,237,850.00	80,975,000.00	Rp	
							Keluaran : Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	562	562	Makam	
							Hasil : Jumlah Kegiatan Pemeliharaan TMP	100	100	%	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**1,311,274,220.00**	**1,036,905,383.00**	**274,368,837.00**		**1,311,274,407.00**	**1,036,905,583.00**		
2.08	**Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**			**1,311,274,220.00**	**1,036,905,383.00**	**274,368,837.00**		**1,311,274,407.00**	**1,036,905,583.00**		
2.08 . 02.2.01	***Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan***			**256,196,300.00**	**246,715,107.00**	**9,481,193.00**		**256,196,300.00**	**246,715,107.00**		
2.08 . 02 . 2.01	***Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota***			**25,283,800.00**	**22,441,207.00**	**2,842,593.00**		**25,283,800.00**	**22,441,207.00**		
2.08 . 02 . 2.01 . 02	*Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kab/kota*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	6,822,000.00	4,105,000.00	2,717,000.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	6,822,000.00	4,105,000.00	Rp	
							Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	Dokumen	
							Hasil : Jumlah PD yang Mendapatkan Pembinaan Pelembagaan PUG	100	100	%	
2.08 . 02 . 2.01 . 03	*Advokasi Kebijakan dan Pendampingan*	Dana Alokasi		15,856,000.00	15,782,407.00	73,593.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	15,856,000.00	15,782,407.00	Rp	

KODE	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	BELANJA			HASIL / KEGIATAN				KET
				ANGGARAN	REALISASI	SISA	INDIKATOR KEGIATAN	RENCANA	REALISASI	SATUAN	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK				Keluaran : Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	43	43	Orang	
							Hasil : Jumlah PD yang Mendapatkan Pembinaan Pelembagaan PUG	100	100	%	
2.08 . 02 . 2.01 . 04	*Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	2,605,800.00	2,553,800.00	52,000.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	2,605,800.00	2,553,800.00	Rp	
							Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	43	43	orang	
							Hasil : Jumlah PD yang Mendapatkan Pembinaan Pelembagaan PUG	100	100	%	
2.08 . 02 . 2.02	***Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota***			**11,500,000.00**	**11,262,300.00**	**237,700.00**		**11,500,000.00**	**11,262,300.00**		
2.08.02.2.02.01	*Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	11,500,000.00	11,262,300.00	237,700.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	11,500,000.00	11,262,300.00	**Rp**	
							Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	4	4	Dokumen	
							Hasil : Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	100.00	100.00	**%**	
2.08.02.2.03	***Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota***			**219,412,500**	**213,011,600**	**6,400,900**		**219,412,500**	**213,011,600**	Rp	
2.08.02.2.03.01	*Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	5,450,000.00	5,429,000.00	21,000.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	5,450,000.00	5,429,000.00	Rp	
							Keluaran : Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang	65	30	Lembaga	

KODE	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	BELANJA			HASIL / KEGIATAN				KET
				ANGGARAN	REALISASI	SISA	INDIKATOR KEGIATAN	RENCANA	REALISASI	SATUAN	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Mendapat Advokasi dan Pendampingan				
							Hasil : Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Mendapatkan Penguatan dan Pengembangan	100	46	%	
2.08.02.2.03.02	*Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	213,962,500.00	207,582,600.00	6,379,900.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	213,962,500.00	207,582,600.00	Rp	
							Keluaran : Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	1725	1725	Orang	
							Hasil : Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Mendapatkan Penguatan dan Pengembangan	100	46	%	
2.08 . 03	***Program Perlindungan Perempuan***			**317,453,700.00**	**232,287,737.00**	**85,165,963.00**		**317,453,700.00**	**232,287,737.00**		
2.08.03.2.01	***Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota***			**94,410,000.00**	**81,237,988.00**	**13,172,012.00**		**94,410,000.00**	**81,237,988.00**		
2.08.03.2.01.0001	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota*			94,410,000.00	81,237,988.00	13,172,012.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	94,410,000.00	81,237,988.00	**Rp**	
							Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	5	6	Dokumen	
							Hasil : Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Ditangani	100.00	120.00	**%**	
2.08.03.2.02	***Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota***			**223,043,700.00**	**151,049,749.00**	**71,993,951.00**		**223,043,700.00**	**151,049,749.00**		
2.08.03.2.02.01	*Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat*			65,000,000.00	65,000,000.00	0.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	65,000,000.00	65,000,000.00	**Rp**	

KODE	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	BELANJA			HASIL / KEGIATAN				KET
				ANGGARAN	REALISASI	SISA	INDIKATOR KEGIATAN	RENCANA	REALISASI	SATUAN	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota										
							Keluaran : Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	370	84	Orang	
							Hasil : Jumlah Layanan Rujukan yang Ditangani	100.00	23.00	%	
2.08.03.2.02.0002	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota*			158,043,700.00	86,049,749.00	71,993,951.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	158,043,700.00	86,049,749.00		
							Keluaran : Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	41	56	Layanan	
							Hasil : Jumlah Layanan Rujukan yang Ditangani	100.00	137.00		
2.08 . 04	***Program Peningkatan Kualitas Keluarga***			**164,779,700.00**	**157,976,328.00**	**6,803,372.00**		**164,779,700.00**	**157,976,328.00**		
2.08 . 04 . 2.01	***Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***			**49,819,600.00**	**47,685,831.00**	**2,133,769.00**		**49,819,600.00**	**47,685,831.00**		
2.08.04.2.01.02	*Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	49,819,600.00	47,685,831.00	2,133,769.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	49,819,600.00	47,685,831.00	Rp	
							Keluaran : Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	1	Dokumen	
							Hasil : umlah Lembaga yang Mendapatkan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.00	100.00	%	
2.08.04.2.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**42,879,600**	**38,875,100**	**4,004,500.00**		**42,879,600**	**38,875,100**	**Rp**	
2.08.04.2.02.02	*Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	42,879,600.00	38,875,100.00	4,004,500.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	42,879,600.00	38,875,100.00	Rp	
							Keluaran : Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan	50	100	Orang	

KODE	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	BELANJA			HASIL / KEGIATAN				KET
				ANGGARAN	REALISASI	SISA	INDIKATOR KEGIATAN	RENCANA	REALISASI	SATUAN	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				
							Hasil : Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Mendapatkan Penguatan dan Pengembangan	100	200	%	
2.08 . 04 . 2.03	***Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota***			**72,080,500.00**	**71,415,397.00**	**665,103.00**		**72,080,500.00**	**71,415,397.00**		
2.08 . 04 . 2.03 . 01	*Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	72,080,500.00	71,415,397.00	665,103.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	72,080,500.00	71,415,397.00	Rp	
							Keluaran : Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	110	142	Layanan	
							Hasil : umlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan KG dan Hak Anak	100	129	%	
2.08 . 05	***PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK***			**5,826,500.00**	**3,375,500.00**	**2,451,000.00**		**5,826,500.00**	**3,375,500.00**		
2.08 . 06 . 2.01	***Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***			**5,826,500.00**	**3,375,500.00**	**2,451,000.00**		**5,826,500.00**	**3,375,500.00**		
2.08 . 06 . 2.01 . 01	*Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	5,826,500.00	3,375,500.00	2,451,000.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	5,826,500.00	3,375,500.00	Rp	
							Keluaran : Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	52	52	Dokumen	
							Hasil : Jumlah Perangkat Daerah yang Menghimpun Data Gender serta Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	100	100	%	
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**			**195,608,800.00**	**176,894,298.00**	**18,714,502.00**		**195,608,800.00**	**176,894,298.00**		
2.08.06.2.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**			**195,608,800.00**	**176,894,298.00**	**11,598,752.00**		**195,608,800.00**	**176,894,298.00**		
2.08.06.2.01.0001	*Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan*			19,116,750.00	12,001,000.00	7,115,750.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	19,116,750.00	12,001,000.00	**Rp**	

KODE	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	BELANJA			HASIL / KEGIATAN				KET
				ANGGARAN	REALISASI	SISA	INDIKATOR KEGIATAN	RENCANA	REALISASI	SATUAN	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota										
							Keluaran : Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	1	2	Organisasi	
							Hasil : Jumlah Kegiatan Kelembagaan PHA	100.00	200.00	%	
2.08.06.2.01.02	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	176,492,050.00	164,893,298.00	11,598,752.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	176,492,050.00	164,893,298.00	Rp	
							Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kot	3	4	Dokumen	
							Hasil : Jumlah Kegiatan Kelembagaan PHA	100	133	%	
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**			**371,409,220**	**219,656,413**	**150,699,207**		**371,409,407**	**219,656,613**	**Rp**	
2.08.07.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**			**124,708,600**	**120,037,863**	**3,617,137**		**124,708,600**	**120,037,863**	**Rp**	
2.08.07.2.01.01	*Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	47,400,000.00	43,782,863.00	3,617,137.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	47,400,000.00	43,782,863.00	Rp	
							Keluaran : Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	150	151	Organisasi	
							Hasil : Jumlah Kegiatan Kelembagaan PHA	100	101	%	
2.08.07.2.01.0006	*koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota*			77,308,600.00	76,255,000.00	1,053,600.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	77,308,600.00	76,255,000.00	Rp	
							Keluaran : Terlaksananya Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	2	3	Dokumen	

KODE	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	BELANJA			HASIL / KEGIATAN				KET
				ANGGARAN	REALISASI	SISA	INDIKATOR KEGIATAN	RENCANA	REALISASI	SATUAN	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Kewenangan Kabupaten/Kota				
							Hasil : Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak yang Ditangani	100	150	%	
2.08.07.2.02	***Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***			**177,680,620.00**	**38,793,050.00**	**138,887,570.00**		**177,680,807.00**	**38,793,250.00**		
2.08.07.2.02.01	*Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	42,164,620.00	31,389,050.00	10,775,570.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	42,164,620.00	31,389,050.00	Rp	
							Keluaran : Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	50	58	Orang	
							Hasil : Jumlah Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Perlindungan Khusus Anak	100	116	%	
	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	135,516,000.00	7,404,000.00	128,112,000.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	135,516,000.00	7,404,000.00		
							Keluaran : Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	37	26	Layanan	
							Hasil : Jumlah Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Perlindungan Khusus Anak	100	70	%	
2.08.07.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**69,020,000.00**	**60,825,500.00**	**8,194,500.00**		**69,020,000.00**	**60,825,500.00**		
2.08.07.2.02.04	*Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	69,020,000.00	60,825,500.00	8,194,500.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	69,020,000.00	60,825,500.00	Rp	
							Keluaran : Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	80	79	Orang	
							Hasil : Jumlah Laporan Hasil Kegiatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100	99	%	
TOTAL				**23,733,163,929.00**	**20,318,906,045.00**	**3,414,257,884.00**		**23,733,164,116.00**	**20,318,909,503.00**		

6. Dokumen bukti dukung (*evidence*) untuk kinerja pada program dan kegiatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Perencanaan Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target 2025	Realisasi	Capaian (%)	Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Meningkatnya Ketercukupan Kebutuhan Dasar PPKS	Persentase PPKS yang Tercukupi Kebutuhan Dasarnya	Renstra 2024–2026	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					
			Renstra 2024–2026	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**78 Nilai**	**78.20 Nilai**	**100%**	**https://drive.google.com/drive/folders/1m_VsZNUpi2UbwYPHeP4dab5B3zRbVMgy?usp=drive_link**
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Persentase Dokumen atau Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Terpenuhi	78 %	100.00 %	128%	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Persentase Dokumen atau Laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun	78 %	83.64 %	107%	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Persentase Dokumen atau Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun	78 %	99.99 %	128%	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Persentase Paket atau Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun	78 %	183.33 %	235%	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Persentase Barang Milik Daerah SKPD yang Diadakan	78 %	100.00 %	128%	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah Persentase Jasa Penunjang Urusan	78 %	111.76 %	143%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Perencanaan Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target 2025	Realisasi	Capaian (%)	Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pemerintahan Daerah	Pemerintahan Daerah yang Tersedia				
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan\ Pemerintahan Daerah	Jumlah Persentase Barang Milik Daerah SKPD yang Terawat	78 %	55.55 %	71%	
			Renstra 2024–2026	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase PSKS yang mendapat pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial**	**85 %**	**100.00 %**	**118%**	
				Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Izin Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	85 %	0.00 %	0%	
				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	85 %	88.23 %	104%	
			Renstra 2024–2026	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase Rehabilitasi Sosial bagi PPKS/ PMKS**	**85 %**	**100.00 %**	**118%**	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, dan Gepeng yang Mendapatkan Layanan Sosial di Luar Panti	85 %	100.00 %	118%	
				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah	Jumlah PPKS/ PMKS yang Mendapatkan Layanan Sosial Dasar di Luar Panti	85 %	100.00 %	118%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Perencanaan Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target 2025	Realisasi	Capaian (%)	Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial					
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	**Persentase PPKS/ PMKS Penerima Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**85 %**	**96.40 %**	**113%**	
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin yang Telah di Verval	85 %	96.40 %	113%	
				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	**Persentase PPKS/ PMKS Korban Bencana yang Ditangani**	**85 %**	**93.94 %**	**111%**	
				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	85 %	89.25 %	105%	
				Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Mendapatkan Pemberdayaan Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	85 %	123.33 %	145%	
			Renstra 2024–2026	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase Pengelolaan TMP**	**85 %**	**100.00 %**	**118%**	
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan TMP	85 %	100.00 %	118%	
B			**Renstra 2024–2026**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Perencanaan Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target 2025	Realisasi	Capaian (%)	Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya Kesetaraan Gender	**Indeks Pemberdayaan Gender**	**Renstra 2024–2026**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase Program Responsif Gender pada Lembaga Pemerintah**	**100 %**	**100.00 %**	**100%**	
				Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PD yang Mendapatkan Pembinaan Pelembagaan PUG	100 %	100.00 %	100%	
				Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	100 %	100.00 %	100%	
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Mendapatkan Penguatan dan Pengembangan	100 %	98.04 %	98%	
	Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Hak Anak	**Indeks Pemenuhan Hak Anak**	**Renstra 2024–2026**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase Layanan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Diskriminasi terhadap Perempuan**	**100 %**	**100.00 %**	**100%**	
				Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Ditangani	100 %	120.00 %	120%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Perencanaan Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target 2025	Realisasi	Capaian (%)	Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota					
				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Rujukan yang Ditangani	100 %	14 %	14%	
	Meningkatnya Kesetaraan Gender	**Indeks Pemberdayaan Gender**	**Renstra 2024–2026**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase Lembaga/ Keluarga yang Mendapat Layanan Responsif Gender**	**100 %**	**100.00 %**	**100%**	
				Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang Mendapatkan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	100.00 %	100%	
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Mendapatkan Penguatan dan Pengembangan	100 %	200.00 %	200%	
				Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan KG dan Hak Anak	100 %	129.09 %	129%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Perencanaan Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target 2025	Realisasi	Capaian (%)	Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota					
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	**Persentase Perangkat Daerah yang Mempunyai Data Gender dan Anak**	**100 %**	**100.00 %**	**100%**	
				Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Menghimpun Data Gender serta Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	100 %	100.00 %	100%	
	Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Hak Anak	**Indeks Pemenuhan Hak Anak**	**Renstra 2024–2026**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase Kecamatan yang Mendapatkan Predikat Kecamatan Layak Anak**	**100 %**	**55.00 %**	**55%**	
				Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Kelembagaan PHA	100 %	150.00 %	150%	
			Renstra 2024–2026	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase Layanan terhadap Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus**	**100 %**	**100.00 %**	**100%**	
				Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak yang Ditangani	100 %	200 %	200%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Perencanaan Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target 2025	Realisasi	Capaian (%)	Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang Mendapatakan Pelayanan Perlindungan Khusus Anak	100 %	96.55 %	97%	
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	98.75 %	99%	
	Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif	Indeks Kesejahteraan Sosial	Renstra Tahun 2025-2029	**Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**					
				Urusan Pemerintahan Bidang Sosial					
	Meningkatnya Fungsi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Meningkat Kemampuan Fungsi Sosialnya (%)	Renstra Tahun 2025-2029	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)**	**78 Nilai**	**78.20 Nilai**	**100%**	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4 Laporan	4 Laporan	100%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Perencanaan Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target 2025	Realisasi	Capaian (%)	Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4 Laporan	4 Laporan	100%	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	24 Orang/ Bulan	19 Orang/ Bulan	79%	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	100%	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18 Laporan	18 Laporan	100%	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2 Orang	2 Orang	100%	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	20 Orang	20 Orang	100%	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi	2 Paket	3 Paket	150%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Perencanaan Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target 2025	Realisasi	Capaian (%)	Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)				
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4 Paket	4 Paket	100%	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2 Paket	4 Paket	200%	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1 Dokumen	3 Dokumen	300%	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2 Laporan	4 Laporan	200%	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1 Laporan	4 Laporan	400%	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1 Unit	1 Unit	100%	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2 Unit	4 Unit	200%	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2 Laporan	3 Laporan	150%	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3 Laporan	4 Laporan	133%	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	100%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Perencanaan Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target 2025	Realisasi	Capaian (%)	Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan\ Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	30 Unit	30 Unit	100%	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	50 Unit	2 Unit	4%	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	25 Unit	25 Unit	100%	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3 Unit	3 Unit	100%	
	Meningkatnya Peran PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang Aktif (%)	Renstra Tahun 2025-2029	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase TKSK yang Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (%)**	**100 %**	**100.00 %**	**100%**	
				Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	4 Dokumen	0 Dokumen	0%	
				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	80 Orang	80%	
					Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	100%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Perencanaan Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target 2025	Realisasi	Capaian (%)	Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	50 Lembaga	50 Lembaga	100%	
	Meningkatnya Fungsi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Meningkat Kemampuan Fungsi Sosialnya (%)	Renstra Tahun 2025-2029	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti (%)**	**65 %**	**100.00 %**	**154%**	
					Persentase PPKS di luar SPM kecuali HIV/ AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	**65 %**	**100.00 %**	**154%**	
					Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti (%)	**65 %**	**100.00 %**	**154%**	
					Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti (%)	**65 %**	**100.00 %**	**154%**	
					Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti (%)	**65 %**	**100.00 %**	**154%**	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	125 Orang	197 Orang	158%	
					Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia	430 Orang	325 Orang	76%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Perencanaan Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target 2025		Realisasi		Capaian (%)	Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7		8		9	10
					Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)						
				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	2000	Orang	2,195	Orang	110%	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	110	Orang	103	Orang	94%	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (Dokumen)	23	Dokumen	1	Dokumen	4%	
	Meningkatnya Fungsi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Meningkat Kemampuan Fungsi Sosialnya (%)	Renstra Tahun 2025-2029	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)**	**70**	**%**	**96.40**	**%**	**138%**	
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	1654	Orang	1,654	Orang	100%	
					Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	198839	Keluarga	198,839	Keluarga	100%	
					Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan	8985	Keluarga	3,093	Keluarga	34%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Perencanaan Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target 2025	Realisasi	Capaian (%)	Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)				
	Meningkatnya Fungsi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Meningkat Kemampuan Fungsi Sosialnya (%)	Renstra Tahun 2025-2029	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (%)**	**70 %**	**93.94 %**	**134%**	
				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	400 Orang	357 Orang	89%	
				Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	18 Orang	60 Orang	333%	
	Meningkatnya Peran PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang Aktif (%)	Renstra Tahun 2025-2029	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase TMP yang terkelola dengan baik (%)**	**100 %**	**100.00 %**	**100%**	
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)	562 Makam	562 Makam	100%	
	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	**Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)**	Renstra Tahun 2025-2029	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
		Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)	Renstra Tahun 2025-2029	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**					
	Meningkatnya	Indeks Pemberday	Renstra Tahun	**PROGRAM PENGARUSUTA**	**Persentase ARG (%)**	**28.5 %**	**28.31 %**	**99%**	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Perencanaan Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target 2025	Realisasi	Capaian (%)	Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemberdayaan Gender (IDG)	aan Gender (Indeks)	2025-2029	**MAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**					
					Persentase Peran serta Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Ekonomi dan Sosial melalui Pelatihan dan Sosialisasi (%)	**0.59 %**	**0.59 %**	100%	
				Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Laporan)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
					Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	43 Orang	43 Orang	100%	
					Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	43 Orang	43 Orang	100%	
				Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	65 Lembaga	30 Lembaga	46%	
					Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia	1725 Orang	1,725 Orang	100%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Perencanaan Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target 2025	Realisasi	Capaian (%)	Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				
				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	**Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)**	**70.00 %**	**4.53 %**	**6%**	
				Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	6 Dokumen	120%	
				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	370 Orang	84 Orang	23%	
					Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	41 Layanan	56 Layanan	137%	
				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	**Persentase Lembaga yang Aktif dalam Peningkatan Kualitas Keluarga (%)**	**100 %**	**100.00 %**	**100%**	
				Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Perencanaan Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target 2025	Realisasi	Capaian (%)	Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang Tersedia				
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	100 Orang	200%	
				Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	110 Layanan	142 Layanan	129%	
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	**Persentase Pemanfaatan Data Gender dan Anak oleh PD (%)**	**100 %**	**100.00 %**	**100%**	
				Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	52 Dokumen	52 Dokumen	100%	
	Meningkatnya Kapasitas dan	Indeks Pemenuhan Hak Anak	Renstra Tahun	**PROGRAM PEMENUHAN**	**Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)**	**65.6 Nilai**	**70.03 Nilai**	**107%**	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Perencanaan Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target 2025	Realisasi	Capaian (%)	Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kolaborasi antar Lembaga Perlindungan Anak	(IPHA) (Indeks)	2025-2029	**HAK ANAK (PHA)**					
				Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	1 Organisasi	2 Organisasi	200%	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	4 Dokumen	133%	
		Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	Renstra Tahun 2025-2029	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)**	**85.4 Nilai**	**86.50 Nilai**	**101%**	
				Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KT	150 Orang	151 Orang	101%	
					Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	2 Dokumen	3 Dokumen	150%	
				Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	50 Orang	58 Orang	116%	
					Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	37 Orang	26 Orang	70%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Perencanaan Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target 2025	Realisasi	Capaian (%)	Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMP	80 Orang	79 Orang	99%	

Nganjuk, 4 Februari 2026
Kepala Dinas Sosial PPPA
Kabupaten Nganjuk

HARIS JATMIKO, S.Pd.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19711219 199803 1 006